

BUKU AJAR

INTEGRASI NASIONAL

Drs. Emil El Faisal, M. Si
Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd
Sulkipani, S.Pd., M.Pd
Ana Mentari, S.Pd., M.Pd
Camellia, S.Pd. M.Pd



Buku Ajar
Integrasi Nasional

copyright © November 2022

Penulis : Drs. Emil El Faisal, M. Si
Dr. Riswan Jaenudin, M.Pd
Sulkipani, S.Pd., M.Pd
Ana Mentari, S.Pd., M.Pd
Camellia, S.Pd. M.Pd

Setting Dan Layout : Ardatia Murty
Desain Cover : Sri Antika Ramadani

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2022
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2022 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm
Halaman : ix + 251 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening Media
Publishing

Cetakan I, Oktober 2022



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com
ISBN : 978-623-8006-29-8

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis diberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu kesempatan untuk menyelesaikan tugas penulisan buku ajar mata kuliah Integrasi Nasional.

Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan untuk junjungan kita nabi agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu penulis selama proses penyelesaian buku ajar ini hingga rampungnya buku ini. Penulis juga berharap semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Tak lupa dengan seluruh kerendahan hati, penulis meminta kesediaan pembaca untuk memberikan kritik serta saran yang membangun mengenai penulisan buku ini, untuk kemudian penulis akan merevisi kembali pembuatan buku ini di waktu berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I INTEGRASI NASIONAL	1
1.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	1
1.2 Materi Pembelajaran	1
1.3 Uraian Materi	1
1.3.1 Pengertian Integrasi Nasional.....	1
1.3.2 Pengertian Integrasi Secara Umum	2
BAB II PENDEKATAN INTEGRASI NASIONAL	5
2.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	5
2.2 Materi Pembelajaran	5
2.3 Uraian Materi	5
2.3.1 Pendekatan Integrasi Nasional.....	5
BAB III PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL	7
3.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	7
3.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran.....	7
3.3 Uraian Materi.....	7
3.3.1 Pentingnya Integrasi Nasional	7

BAB IV MASALAH DAN TANTANGAN INTEGRASI	
NASIONAL	13
4.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	13
4.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	13
4.3 Uraian Materi	13
4.3.1 Masalah Integrasi Nasional.....	13
4.3.2 Tantangan Integrasi Nasional	17
4.3.3 Ancaman Integrasi Nasional	17
4.3.4 Cara Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional	26
BAB V LINGKUNGAN STRATEGI, PELUANG, DAN KENDALA	
INTEGRASI NASIONAL	29
5.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	29
5.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	29
5.3 Uraian Materi	29
5.3.1 Lingkungan Strategi, Peluang, dan Kendala Integrasi Nasional	29
BAB VI DIMENSI INTEGRASI NASIONAL.....	41
6.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	41
6.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	41
6.3 Uraian Materi	41
6.3.1 Dimensi Integrasi Nasional	41

BAB VII KONSEP BANGSA	47
7.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	47
7.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	47
7.3 Uraian Materi	47
7.3.1 Konsep Bangsa	47
BAB VIII NASIONALISME DAN ANCAMAN DISINTEGRASI ..	51
8.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	51
8.2 Materi Pembelajaran	51
8.3 Uraian Materi	52
8.3.1 Pengertian Nasionalisme	52
8.3.2 Unsur-unsur Nasionalisme	52
8.3.3 Timbulnya Nasionalisme.....	53
8.3.4 Tujuan Nasionalisme.....	53
8.3.5 Faktor Pendorong Munculnya Integrasi Bangsa.....	54
8.3.6 Ancaman Disintegrasi Bangsa.....	55
BAB IX ETNO NASIONALISME DAN BENTUK NASIONALISME	
LAINNYA	61
9.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	61
9.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	61
9.3 Uraian Materi	61
9.3.1 Pengertian Etno Nasionalisme.....	61

9.3.2 Penyebab Etno Nasionalisme	64
9.3.3 Dampak Adanya Etno Nasionalisme bagi Bangsa Indonesia	68
9.3.4 Bentuk-bentuk Nasionalisme	74
BAB X PRIORITAS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBINAAN	
INTEGRASI NASIONAL	95
10.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	95
10.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	95
10.3 Uraian Materi	96
10.3.1 Pentingnya Strategi Pembinaan Integrasi Nasional.....	96
10.3.2 Strategi Pembinaan Integrasi Nasional.....	99
10.3.3 Hambatan Pengimplementasian Strategi Pembinaan Integrasi Nasional	104
10.3.4 Prioritas Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Integrasi Nasional	109
BAB XI SEJARAH INTEGRASI NASIONAL	115
11.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	115
11.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	115
11.3 Uraian Materi	116
11.3.1 Integrasi Bangsa pada Zaman Sebelum Penjajahan.....	116

11.3.2 Integrasi Bangsa Indonesia pada Zaman Penjajahan.....	118
11.3.3 Integrasi Bangsa Indonesia pada Zaman Pergerakan Nasional	124
11.3.4 Integrasi Bangsa pada Zaman Setelah Kemerdekaan	141
BAB XII PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA	155
12.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	155
12.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	155
12.3 Uraian Materi	156
12.3.1 Pengertian Pluralitas	156
12.3.2 Bentuk Puralitas Masyarakat Indonesia ..	157
12.3.3 Bentuk Perbedaan Agama di Indonesia...	161
12.3.4 Bentuk Perbedaan Budaya.....	180
12.3.5 Unsur Kebudayaan	181
12.3.6 Faktor Perbedaan Kebudayaan Masyarakat Indonesia	184
12.3.7 Peran dan Fungsi Keberagaman Budaya .	189
12.3.8 Perbedaan Pekerjaan Di Indonesia	191

BAB XIII POTENSI KONFLIK DALAM MASYARAKAT	195
13.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	195
13.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	195
13.3 Uraian Materi	196
13.3.1 Definisi Konflik Dalam Masyarakat	
Indonesia	196
13.3.2 Macam-macam konflik di dalam	
masyarakat Indonesia	202
13.3.3 Penyebab terjadinya konflik di masyarakat	
Indonesia	209
13.3.4 Cara mengatasi konflik dalam Masyarakat	
Indonesia	213
BAB XIV WUJUD INTEGRASI NASIONAL.....	221
14.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran	221
14.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	221
14.3 Uraian Materi	222
14.3.1 Pentingnya Integrasi Nasional sebagai	
Wujud Identitas Masyarakat Indonesia ...	222
14.3.2 Mewujudkan Integrasi Nasional dalam	
Pengimplementasian Kehidupan	
Bermasyarakat Berbangsa dan	
Bernegara	225
DAFTAR PUSTAKA.....	246

1.1 Kemampuan Akhir capaian Pembelajaran

Setelah Mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Integrasi Nasional menurut padar ahli yang berbasis karakter nilai mandiri dan nilai bersahabat/komunikatif.

1.2 Materi Pembelajaran

1.2.1 Pengertian Integrasi nasional menurut para Ahli

1.2.2 Pengertian integrasi secara umum

1.3 Uraian Materi

1.3.1 Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Penjelasan mengenai integrasi nasional mempunyai banyak macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Integrasi didefinisikan proses asimilasi sampai membentuk satu kesatuan yang utuh.

Maka, Integrasi nasional disimpulkan sebagai tahap-tahap dari penyatuan wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah dimana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Dari sisi antropologis, integrasi nasional merupakan tahapan penyesuaian diri dengan macam-macam faktor budaya dalam mencapai kesesuaian fungsi-fungsi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh semua warga negara. Dalam hal ini, integrasi nasional mencakup syarat-syarat, formasi-formasi serta hambatan-hambatannya.

1.3.2 Pengertian Integrasi Menurut Para ahli

Berikut ini pengertian menurut beberapa ahli:

- **Dr. Nazardin Shamsudin**

Integrasi nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek-aspek

kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

- **Howard Wriggins**

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan beberapa bagian dari suatu individu dalam masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih kompleks, ataupun penyatuan dari banyaknya organisasi kecil dalam satu bangsa.

- **Myron Weiner**

Integrasi nasional adalah berbagai tahapan kelompok sosial maupun budaya dalam satu wilayah dalam membangun suatu identitas nasional.

- **J. Soedjati Djiwandono**

Integrasi nasional adalah suatu proses dalam mendamaikan keberlangsungan dalam kesatuan nasional yang sesuai dengan hak dalam menetapkan nasib sendiri.

- **Safari di Bahar**

Integrasi nasional dapat diartikan bahwa berbagai unsur bangsa yang mulanya terpisah, disatukan atau disempurnakan kembali.

- **Alfani**

Integrasi nasional merupakan penciptaan suatu identitas nasional dan integrasi dari banyaknya kelompok sosial dan budaya yang menjadi satu kesatuan wilayah.

- **KBBI**

Integrasi nasional merupakan suatu rupa yang mengintegrasikan banyaknya macam organisasi yang terkait dengan budaya dan sosial secara regional dan dapat menciptakan suatu identitas nasional.

BAB

II PENDEKATAN INTEGRASI NASIONAL

2.1 Kemampuan Akhir capaian Pembelajaran

Setelah Mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan integrasi nasional yang berbasis karakter nilai demokratis

2.2 Materi Pembelajaran

2.2.1 Pendekatan Integrasi

2.3 Uraian Materi

2.3.1 Pendekatan integrasi Nasional

Perawakan, gagasan, buah pikiran, pengertian dasar dan cita-cita. Logia berarti ajaran, sehingga secara harfiah Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran atau ilmu tentang gagasan dasar atau buah pikiran (Science des ideas).

Kesempatan Pembangunan Ekonomi :

Kesempatan pembangunan ekonomi jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan

keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut dapat menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi

- 1) Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama
- 2) Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki “cross cutting affiliation” sehingga menghasilkan “cross cutting loyalty”.
- 3) Masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun didalamnya dalam bidang ekonomi.

BAB



PENTINGNYA INTEGRASI NASIONAL

3.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah Mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya integrasi nasional yang berbasis karakter nilai cinta damai, nilai cinta tanah air, dan nilai peduli sosial.

3.2 Bahan Kajian / Materi Pembelajaran

3.2.1 Pentingnya integrasi nasional

3.3 Uraian Materi

3.3.1 Pentingnya integrasi nasional

Bangsa Indonesia identik dengan bangsa yang memiliki berbagai macam keberagaman suku bangsa dan budaya, hingga bangsa Indonesia sering dijumpai dengan berbagai masalah cara untuk memepersatukan keberagaman individu yang terdapat di dalamnya agar mempunyai rasa persatuan, kemauannya untuk bersatu dan bersama-sama. Negara-bangsa pasti memerlukan

persatuan untuk bangsanya yang disebut dengan integrasi nasional. Integrasi nasional didefinisikan sebagai tahapan menyatukan beberapa bagian, unsur atau elemen yang mulanya terpisah dari kehidupan bermasyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh, hinggamenjadi satu *nation* (bangsa).

Integritas nasional dapat dilihat dari tiga aspek yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Myron weiner integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik dan Myron membagi Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni : integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit-massa, dan integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Hubungan saling ketergantungan akan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis antar daerah. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda (seperti meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya) dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegritas bangsa merupakan kebalikan dari integritas nasional yaitu memudarnya kesatuan antar golongan yang ada dalam bangsa tersebut. Dalam sejarah Indonesia, model integrasi nasional yang berkembang antara lain :

1. Model integrasi Imperium Majapahit, yaitu model yang bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris
2. Model integrasi kolonial, merupakan hubungan birokrasi vertikal antara kolonial dengan pribumi
3. Model integrasi nasional Indonesia, merupakan proses terbentuknya kesadaran dan semangat berbangsa yang merdeka. Penumbuhan kesadaran berbangsa melalui tahapan-tahapan yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak.

Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni

- Adanya ancaman dari luar, dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama.
- Gaya politik kepemimpinan, yang dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa
- Kekuatan lembaga–lembaga politik, Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa.
- Ideologi Nasional, seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati oleh suatu negara. Apabila masyarakat dapat menerimanya maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu.
- Kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan.

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan

bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.

Integrasi nasional sangatlah penting untuk negara Indonesia dikarenakan integrasi nasional ini dapat menyatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang terdapat di negara Indonesia, sehingga diharapkan tidak adanya lagi pertikaian yang mengakibatkan perpecahan yang kelak terjadi karena perbedaan semata.

BAB

IV

MASALAH DAN TANTANGAN INTEGRASI NASIONAL

4.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah Mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan masalah integrasi nasional, tantangan integrasi nasional, ancaman integrasi nasional dan cara mengatasi ancaman integrasi nasional yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, dan nilai rasa ingin tahu.

4.2 Bahan Kajian / Materi Pembelajaran

4.2.1 Masalah integrasi nasional

4.2.2 Tantangan integrasi nasional

4.2.3 Ancaman integrasi nasional

4.2.4 Cara mengatasi ancaman integrasi nasional

4.3 Uraian Materi

4.3.1 Masalah integrasi nasional

Beberapa contoh perbedaan yang menjadi masalah Integrasi Nasional di dalam kehidupan

berbangsa serta bernegara:

1. Adanya kepentingan yang berbeda : Kepentingan ada karena adanya dasar dari munculnya sikap suatu individu. Seorang individu bersikap karena memiliki dorongan dalam mencukupi kepentingannya, begitu juga halnya dengan konflik. Konflik biasanya ada dikarenakan terciptanya perbedaan yang sesuai dengan individu di dalam suatu interaksi sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ciri fisik, kepintaran, ilmu pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Dengan tingkah yang dimiliki seorang individual dalam berinteraksi sosial, konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat dan setiap individu pasti pernah mengalami konflik dengan setiap orang baik dengan antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik bisa hilang jika masyarakat itu sendiri yang juga menghilang. Tetapi sering juga secara terioristis, adanya perbedaan kepentingan juga menciptakan permasalahan yang begitu pelik bagi orang yang

melakukannya. Dilihat dari sudut pandang perilaku, konflik berupa bentuk minteraktif yang kejadiannya ada pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Konflik ini ada terutama di tingkatan individual yang mudah stres.

2. Dendam karena kalah dari sekolah lain: Umumnya terjadi ketika adanya kompetisi antar sekolah. Tim sekolah A kalah dari sekolah B. Hal ini bisa menjadi penyebab rasa kekecewaan dan peliknya pikiran mereka, dan melampiaskan rasa kekecewaannya dengan mengajak berkelahi tim dari sekolah B tersebut. Hal ini merupakan bentuk ketidaksportifan pelajar dalam menerima kekalahan.
3. Konflik Sosial : Kepentingan ini menjadi dasar dari munculnya tingkah laku seorang individu. Individu bertingkah laku dikarenakan munculnya dorongan dalam memenuhi kepentingan dirinya. Dengan berpedoman pada prinsip bahwa tingkah laku seorang individu adalah suatu cara atau alat untuk mencukupi kebutuhannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat

pada hakikatnya merupakan kepuasan pemenuhan dari kepentingan tersebut.

Jadi, individu mempunyai arti bahwa tiada dua orang yang mirip dalam pribadinya, jadi dengan sendirinya muncul adanya perbedaan individu dalam hal kebutuhannya.

Diskriminasi ialah kejadian yang umumnya ada di dalam masyarakat, yang menjadi penyebabnya ialah karena kecondongan individu dalam membedakan dengan individu lain.

Etnosentrisme merupakan suatu kecondongan dalam melihat dunia yang hanya dari sudut pandang budaya sendiri. Maksudnya etnosentrisme merupakan suatu kecondongan yang mengamati nilai-nilai dan norma-norma budaya sendiri sebagai suatu hal yang prima, terbaik, mutlak, dan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai dan membedakan dengan budaya lain. Permasalahan yang dihadapi Indonesia setelah merdeka ialah integrasi antara masyarakat majemuk. Integrasi bukanlah penyatuan tetapi kesamaan dalam persatuan. Masyarakat majemuk tetap ada pada kemajemukannya, mereka hidup selaras dan

berdampingan (Bhinneka Tunggal Ika), berbeda-beda tetapi merupakan kesatuan.

4.3.2 Tantangan Integrasi nasional

Tantangan dalam integrasi nasional meliputi antara lain:

- 1) Ketidakadilan
- 2) Penegakan hukum
- 3) Eksploitasi
- 4) Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur
- 5) Kesenjangan sosial
- 6) KKN
- 7) Diskriminasi
- 8) Kemiskinan
- 9) Keterasingan

4.3.3 Ancaman Integrasi Nasional

Letak negara Indonesia yang berada di titik tengah dunia melewati garis khatulistiwa, dihimpit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi ini menampakkan bahwa wilayah Indonesia ada pada posisi silang yang sangat strategis.

Penting untuk diketahui, posisi silang negara Indonesia tidak hanya mencakup dari aspek wilayah saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sosial, diantaranya:

- a. Penduduk Indonesia dominan berada pada daerah yang berpenduduk padat di utara dan daerah selatan yang jarang berpenduduk.
- b. Ideologi Indonesia yang berada diantara ideologi komunis di utara dan liberalis di selatan.
- c. Demokrasi Pancasila diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian utara) dan demokrasi liberal di selatan.
- d. Ekonomi Indonesia diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
- e. Masyarakat Indonesia berada antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan.
- f. Kebudayaan Indonesia diantara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan.
- g. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada diantara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan

timur.

Posisi silang Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia.

Dijelaskan potensi karena memberikan efek yang positif untuk kemajuan bangsa Indonesia dan akan memperkuat keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang tidak dapat diremehkan perannya untuk menunjang kemajuan serta menciptakan perdamaian dunia. Tetapi, posisi silang ini juga membuat negara Indonesia sebagai negara yang tidak lepas dari ancaman yang dapat menghancurkan bangsa itu sendiri.

Apa yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non- militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer.

a. Ancaman Militer

Ancaman militer yang merupakan ancaman yang memakai kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mampu untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, serta perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Ancaman Militer Dalam Negeri

- Disintegrasi bangsa, meliputi berbagai macam gerakan separatis yang berlandaskan pada sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah mengenai kebijakan pemerintah pusat.
- Keresahan sosial merupakan dampak dari adanya ketimpangan kebijakan di bidang ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya bisa mengakibatkan kerusuhan massal.

- Upaya mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain ekstrim atau tidak sinkron dengan kebiasaan masyarakat Indonesia.
- Makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional

2. Ancaman Militer Luar Negeri

- Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain.
- Pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain.
- Aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Berikut beberapa contoh dari ancaman militer terhadap negara :

1) Agresi, merupakan ancaman yang bersifat militer yang memakai kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut.

- 2) Invasi, merupakan serangan bersenjata kepada wilayah NKRI oleh negara lain.
- 3) Bombardemen, mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI.
- 4) Blokade, cara atau bentuk yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain, dan lain-lain.
- 5) Spionase merupakan ancaman militer yang dilakukan kepada suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara.
- 6) Sabotase, merupakan ancaman militer yang dilaksanakan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan obyek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat

membahayakan keselamatan suatu bangsa.

- 7) Ancaman militer yang mempunyai motif aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas (internasional) atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerjasama dengan terorisme lokal (dalam negeri).
- 8) Pemberontakan, berupa penggunaan senjata. Selain pemberontakan, adanya perang saudara yang memakai senjata juga masuk ke dalam ancaman militer.

b. Ancaman Non Militer

Ancaman non militer mempunyai karakter berbeda dengan ancaman militer, tidak bersifat fisik dan biasanya bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non militer berupa ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan dan keamanan.

Berikut beberapa contoh ancaman yang berbentuk non militer :

1) Ancaman Berdimensi Ideologi

Sejak Uni Soviet runtuh, sistem politik internasional mengalami perubahan sehingga paham komunis tidak lagi populer. Akan tetapi, ancaman terhadap ideologi masih harus diperhitungkan.

2) Ancaman Berdimensi Politik

Politik menjadi instrumen utama dalam memprovokasi perang. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman politik dapat meruntuhkan suatu rezim pemerintahan, hingga dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional ikut campur tang dalam suatu negara melalui politik seperti contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), dll.

3) Ancaman Berdimensi Ekonomi

Ekonomi dapat dikatakan menjadi salah satu penentu posisi setiap negara di dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentunya sangat menentukan dalam pertahanan suatu negara. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi menjadi 2, yakni internal serta eksternal.

- a. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tak cukup jelas.
- b. Ancaman eksternal berupa kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi serta tingkat ketergantungan terhadap pihak asing.

4) Ancaman Berdimensi Sosial Budaya

Ancaman sosial budaya dapat berbentuk topik-topik tentang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang pada umumnya menjadi dasar dari munculnya konflik vertikal, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Di tahun 1994, adanya 18 peperangan dari 23 peperangan yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama, serta etnis. Selain itu, 75% dari pengungsi dunia yang mengungsi ke banyak negara lain. Mempunyai alasan yang sama. Selain itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang ditugaskan oleh PBB untuk mengusahakan adanya perdamaian

dalam berbagai macam konflik antar etnis di dunia.

5) Ancaman Berdimensi Teknologi Informasi

Kejahatan juga terus menghantui perkembangan kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan.

6) Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum

Bencana alam, contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami, yang mengancam keselamatan umum manusia. Umumnya ancaman yang menjadi penyebabnya ialah manusia, contohnya berupa penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, maupun kecelakaan alat-alat transportasi.

4.3.4 Cara Mengatasi Ancaman Integrasi Nasional

Apabila ancaman militer ini tidak diatasi, maka akan sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, harus digunakan strategi yang

tepat dalam menyelesaikan ancaman integrasi nasional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di dalam UUD tersebut menitikberatkan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini menjadi tanggungjawab seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya TNI dan POLRI yang bertanggung jawab; tetapi masyarakat sipil juga mempunyai tanggung jawab dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan negara; sehingga TNI dan POLRI bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan lingkungan strategi, peluang, dan kendala integrasi nasional yang berbasis karakter nilai rasa ingin tahu, dan nilai bersahabat/komunikatif.

5.2 Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran

5.2.1 Lingkungan strategi, peluang, dan kendala integrasi nasional

5.3 Uraian Materi

5.3.1 Lingkungan strategi, peluang, dan kendala integrasi nasional

Sesungguhnya pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia sudah diterapkan sejak awal NKRI terbentuk dengan kesepakatan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian Presiden RI-1 (pertama) Bung Karno memaklumkan bahwa Pancasila sebagai landasan

dalam pelaksanaan "*Character and Nation Building*" dalam kerangka pembinaan integrasi bangsa, dikarenakan Preseiden Soekarno sangat paham dan sadar mengenai heterogenitas negara dan bangsa Indonesia.

Pembinaan integrasi bangsa juga sangat dipengaruhi perkembangan lingkunganstrategis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Proses integrasi nasional bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini masih mengalami pasang surut.

Potensi ancaman yang paling besar terhadap bangsa (*nation*) sebagai suatu komunitas politik modern ialah jika terjadinya disintegrasi nasional oleh adanya pelemahan dari ikatan kejiwaan bangsa (*collective memory*) dan adanya pembusukan politik di kalangan elite dalam wujud tidak berfedahnya lembaga- lembaga negara dan menurunnya legitimasi elite bangsa.

Jika aspirasi serta kepentingan dan rasa keadilan massa/rakyat adanya pelanggaran secara sewenang-wenang oleh kaum elite, maka hal itu menunjukkan motif kuat timbulnya perlawanan massa/rakyat terhadap elite. Hal itu merupakan "kerawanan" untuk proses penetapan integrasi nasional bangsa Indonesia.

Untuk membangun, membina, dan menetapkan proses integrasi nasional, media massa mempunyai peran yang sangat besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan-perbedaan yang timbul di masyarakat dalam hubungannya dengan para pengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam proses membangun integrasi nasional bangsa Indonesia, harapannya media massa juga bertindak sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial yang di maksud ialah sebagai pengamat lingkungan terhadap jalannya interaksi sosial, baik antara sesama masyarakat.

Faktor lain yang penting menjadi perhatian dalam konteks fungsi sosial ialah media massa mempunyai kemampuan dalam memperluas wawasan khalayaknya. Oleh karena itu, fungsi mendidiknya sebaiknya lebih utama, tetapi jika media massa terlalu berlebihan menyampaikan informasi, maka akibatnya bisa menjadi terbalik. Salah satu fungsi mendidik ialah mampu berfungsi mengutamakan mana yang penting dan mana yang tidak. Jadi, kemampuan media massa sebagai jembatan integrasi bangsa sangatlah besar. Dalam kampanye-kampanye politik, media massa paling sering

dipakai sebagai alat pemersatu. Demikian juga media massa mampu dipakai untuk menaikkan atau membangkitkan aspirasi masyarakat yang lebih mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan daripada perpecahan. Kemampuan media massa dalam membangkitkan semangat persatuan pada umumnya lebih sering dijumpai di negara-negara yang berkembang daripada negara maju. Hal itu dikarenakan oleh masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara berkembang ialah pelaksanaan pembangunan ekonomi sebab pembangunan ekonomi kaitannya sangat erat dengan pembangunan politik dimana kedua-duanya saling menyangga.

Faktanya, dalam pelaksanaan konteks integrasi bangsa, media massa lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu dengan penguasaan media yang bersangkutan. Hal yang perlu menjadi perhatian ialah kesadaran dari media massa yang digunakan untuk menjadi jembatan integrasi bangsa harus telah mempunyai niat baik dalam membantu tanpa adanya paksaan. Faktor itu akan sangat menentukan dikarenakan pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh media massa

akan dipercaya oleh masyarakat, hingga apa yang menjadi agenda media massa juga akan menjadi agenda publik.

Apabila di dalam masyarakat muncul perbedaan pendapat, media massa sanggup untuk menampungnya menjadi sarana pengungkapan aspirasi sosial masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi. Bahkan, dalam hal-hal tertentu media massa sanggup memberi masukan dalam proses komunikasi interpersonal.

Media massa dapat menyelesaikan konflik sosial yang memancing disintegrasi bangsa. Begitupun sebaliknya, media massa juga merusak integrasi bangsa apabila digunakan oleh kekuatan-kekuatan tertentu.

Sering timbulnya masalah-masalah konflik di media massa, juga disebabkan adanya perbedaan analisa cara penyampaian antara yang satu dengan yang lainnya, baik tentang objek berita, ataupun sudut pandang yang kritis mengenai peristiwa yang ditampilkan. Jika sudut pandang dan analisisnya sangat berbeda, maka dapat mengundang konflik, dan konflik yang terlalu berlebihan di media massa dapat berpotensi merusak integrasi bangsa. Oleh karena itu, peran media massa menjadi sarana yang efektif untuk membentuk opini integrasi

bangsa secara demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berlanjut harus dipelihara.

Dalam rangka pembinaan integrasi nasional bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, perlu diidentifikasi faktor-faktor berpengaruh dalam negeri dan luar negeri berupa kendala dan peluangnya.

1) Kendala

Dalam era reformasi saat ini, muncul kembali ideologi non-Pancasila, antara lain, ideologi agama, ideologi liberalis, kapitalis, dan individualis. Salah satu tujuan reformasi nasional adalah demokratisasi, namun yang terjadi adalah kebebasan untuk mencapai kepentingan pribadi, kelompok organisasi, dan daerahnya sendiri dengan segala cara, yang diwarnai oleh primordialisme dan feodalisme dengan mengabaikan kepentingan nasional. Perkembangan perekonomian Indonesia sampai dengan saat ini belum pulih betul, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya atau memindahkan perusahaannya ke luar negeri. Banyak konglomerat Indonesia yang bermasalah, melarikan modalnya ke luar negeri, sedangkan investor baru masih menunggu situasi politik dan keamanan yang

stabil. Utang atau bantuan luar negeri masih merupakan keperluan dan sekaligus beban bagi generasi yang akan datang. Akibat jumlah pengangguran dan penduduk miskin meningkat, terjadilah kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar, sehingga mengundang peningkatan tindakan kriminalitas. Rasa kebangsaan dan persatuan bangsa semakin merosot, kelompokkelompok primordial tumbuh dengan subur dan KKN terus merajalela.

Konflik atau bentrokan antar kelompok masih terjadi di beberapa daerah. Separatisme dan konflik bersenjata masih berlangsung di Irian Jaya dan penegakan hukum masih lemah sehingga belum memberikan dampak yang positif. Kemampuan operasional TNI memerlukan dukungan alat peralatan yang memadai, dan dukungan logistik, serta masih dibayangkan trauma pelanggaran hak asasi manusia.

2) Peluang

Pancasila masih ditetapkan oleh MPR No.18 Tahun 1988 tentang penghapusan P4 sebagai dasar negara dan ideologi nasional, yang berarti merupakan

perintah kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan Pancasila dalam mengatur kehidupan nasional guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk memantapkan integrasi nasional bangsa Indonesia, hal ini ditandai dengan beberapa indikasi sebagai berikut:

- a. Potensi kekayaan sumber alam Indonesia yang cukup besar dan sangat banyak serta beraneka ragam wilayah kepulauan yang luas disertai posisi geografis yang strategis merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional.
- b. Potensi sumber daya manusia Indonesia dalam sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan peluang perdagangan bebas yang menjadi harapan untuk berpeluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang merata.
- c. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang ada merupakan peluang untuk memantapkan kembali kesadaran berbangsa Indonesia dalam wadah NKRI.
- d. "*Character and Nation Building*" yang telah dirintis oleh Bung Karno merupakan peluang untuk

digelorakan kembali.

- e. TNI dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya, Polri dengan Tri Bratanya, PNS dengan Panca Prasetyanya, tetap memiliki tekad dan semangat juang untuk menciptakan keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI. Warga bangsa yang memiliki jiwa patriot dan kesetiaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila merupakan potensi untuk dibina menjadi kekuatan dalam mengatasi gerakan dan pemberontakan bersenjata kaum separatis.
- f. Bahasa nasional bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu mendapat perhatian dan perlakuan yang semestinya. Bahasa daerah dan bahasa asing tidak boleh menjadi faktor pengganggu integrasi nasional
- g. Budaya Indonesia melalui Pengembangan budaya nasional di samping budaya daerah, akan menanamkan dan mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai bangsa sekalipun majemuk, tetap terikat dalam kesatuan keindonesiaan. Prioritas Kebijakan dan Strategi

Pembinaan Integrasi Nasional.

Prioritas Kebijakan dan strategi pembinaan integrasi nasional

Mengapa integrasi Bangsa Indonesia perlu secara terus menerus dipupuk dan dibina dari generasi ke generasi ?. Jawabannya adalah karena adanya faktor-faktor dominan yang secara alamiah melekat pada bangsa Indonesia seperti yang sudah dijelaskan pada awal tulisan ini.

Karena permasalahan integrasi nasional sangat kompleks, maka penting untuk dipilah prioritas yang sesuai dalam menentukan kebijakan dan strategi pembinaannya, yang akan diwujudkan melalui sasaranjangka pendek dan jangka panjang.

1) Jangka Pendek :

- ❖ Tegaknya kedaulatan NKRI di Irian Jaya.
- ❖ Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- ❖ Tegaknya hukum dan pemberantasan KKN.
- ❖ Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang makin merata.

- ❖ Mulai tertatanya kehidupan politik yang demokratis dan keterbukaan berlandaskan Pancasila.
- ❖ Pemanfaatan peranan pers ditingkat nasional dan daerah untuk menghindari disintegrasi nasional.

2) Jangka Panjang :

- + Mantapnya integrasi bangsa melalui sistem pendidikan nasional dalam arti luas.
- + Mantapnya kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan.
- + Tertatanya kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila.
- + Terpeliharanya penegakan hukum dan disiplin nasional.
- + Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- + Terpeliharanya, kedaulatan NKRI di seluruh wilayah Nusantara.
- + Pembinaan dan penggunaan bahasa nasional Indonesia yang baik di setiap strata nasional.
- + Pelurusan sejarah nasional yang benar.
- + Adanya penataan budaya, basis sosial, struktur,

sistem rekrutmen dan rotasi para elite, proses pengambilan keputusan, pola komunikasi politik serta distribusi pendapatan dari aktor-aktor politik.

- ✚ Kebijakan dan sistem pencegahan kejahatan dan penegakan hukum.
- ✚ Tertatanya kehidupan harmonis dan adil diantara komunitas primordial-etnis, masyarakat adat dan kelompok minoritas.
- ✚ Mewujudkan media massa yang demokratis, transparan, kritis dan mendukung integrasi nasional secara berkelanjutan.
- ✚ Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut perlu didukung kepemimpinan nasional serta para elite nasional yang memiliki integritas moral yang tinggi serta dapat diandalkan, kualitas SDM dengan jiwa nasionalisme/patriotisme, juga berfungsinya institusi kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan secara sinergik guna mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang luas secara berkeadilan.

BAB

VI

DIMENSI INTEGRASI NASIONAL

6.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan dimensi integrasi nasional yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai demokratis, nilai cinta damai, dan nilai peduli sosial.

6.2 Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran

6.2.1 Dimensi integrasi nasional

6.3 Uraian Materi

6.3.1 Dimensi integrasi nasional

Integrasi nasional bisa dipandang dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal merupakan dimensi yang berkaitan dengan usaha untuk mempersatukan persepsi, kemauan, dan harapan yang ada antara elite dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal ialah usaha untuk

menciptakan integrasi dengan menjembatani adanya perbedaan diantara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Lalu, dimensi horizontal merupakan dimensi yang berkaitan dengan usaha dalam menciptakan persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horizontal merupakan usaha menciptakan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok di dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini sering disebut dengan integrasi teritorial.

Penjelasan mengenai integrasi nasional mencakup dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dengan demikian persoalan integrasi nasional menyangkut keselarasan hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta keselarasan hubungan antara kelompok di dalam masyarakat dengan banyaknya latar belakang perbedaan di dalamnya.

Dalam usaha untuk menciptakan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari keduanya. Dalam dimensi horizontal tantangan berkaitan dengan pembelahan horizontal yang bersumber pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal yang menjadi tantangan ialah adanya celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menjadi penyebab kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkaitan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke publik setelah berbaur dengan dimensi horizontal, hingga menunjukkan kesan bahwa dalam banyak kasus di Indonesia, dimensi horizontal lebih mencuat daripada dimensi vertikalnya. (Sjamsuddin, 1989: 11).

Tantangan integrasi nasional tersebut lebih mencuat ke permukaan setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi beriringan dengan adanya pelemahan otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang dicanangkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak diselewengkan oleh

kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Tindakan mana kemudian melahirkan gesekan-gesekan yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat dan memicu munculnya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga sering terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diiringi oleh tindakan-tindakan yang anarkis.

Adanya keinginan yang kuat dari pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga

masyarakat, tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan kaitan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horisontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horisontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

7.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bangsa yang berbasis karakter nilai demokratis, dan nilai semangat kebangsaan.

7.2 Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran

7.2.1 Konsep bangsa

7.3 Uraian Materi

7.3.1 Konsep Bangsa

Konsepsi "bangsa" (nation) dan konsepsi "negara bangsa" (nation state) merupakan suatu produk sejarah modern. Para pemimpin/pendiri gerakan kebangsaan Indonesia (founding fathers dan founding mothers) menggunakan konsepsi bangsa (nation) dari Ernest Renan, Otto Bauer, dan Hogopian sebagai dasar perjuangan mereka.

- a. Esensi teori Ernest Renan tentang bangsa adalah sebagai berikut :

1. Satu bangsa adalah suatu jiwa dan suatu asas kerohanian
 2. Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est ungrand solidarite)
 3. Satu bangsa tidak memerlukan :
 - ✓ Persatuan Bahasa
 - ✓ Persatuan Agama
 - ✓ Persatuan Turunan
 4. Suatu keinginan untuk hidup bersama baik dimasa sekarang dandimasa yang akan datang
- b. Esensi teori Otto Bauer tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa adalah satu persamaan, suatu persatuan karakter dan watak, yang tumbuh dan lahir karena persatuan pengalaman (eine nation ist lene aus schicksal gemeinschaft erwachsene charackter gemeinschaft).
- c. Esensi teori Hogopian tentang bangsa adalah sebagai berikut : Bangsa (nation) : "A group of people who identify each other. The resultant we feeling separates them from others, who may or may not have a we feelingof their own"

Apabila definisi tentang bangsa dari Ernest Renan diteliti ternyata sejalan dengan teori Otto Bauer dan Hogopian, yaitu suatu bangsa tidak perlu harus ada persamaan dalam :

- a. Bahasa
- b. Agama
- c. Keturunan
- d. warna kulit
- e. budaya, dan sebagainya

Kemudian, Soekarno melengkapinya lagi dengan catatan bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya kehendak untuk hidup bersama (dari Ernest Renan), ia punya karakter persatuan (dari Otto Bauer dan Hogopian), tetapi yang berdiam di atas satu wilayah geopolitik yang nyata sebagai satu persatuan. Menurut Bung Karno, geopolitik ialah hubungan antara letak tanah dan air dengan rasa dan kehidupan politiknya.

Dari pendapat para ahli/pakar tersebut, para founding fathers/founding mathers membuat rumusan konsepsi bangsa (Nation) sebagai berikut : Bangsa (Nation) adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara, yang walaupun berbedalatar belakang ras,

etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain, tetapi punya kehendak yang kuat untuk bersatu dibawah payung negara nasional dan di dalam suatu wilayah yang jelas Integrasi nasional tidak mungkin terwujud sendiri, tetapi hanya akan terwujud atau diwujudkan melalui upaya berlanjut, yaitu integrasi setiap komponen negara dan integrasi antar komponen negara.

Bangsa tumbuh dan dibentuk secara sadar dan bertahap sebagai komunitas politik modern yang memayungi berbagai komunitas primordial, dengan tujuan sebagai sarana dan wahana kolektif untuk mewujudkan masa depan bersama baik dalam bidang kesejahteraan maupun bidang keamanan. Selain itu, pengalaman sejarah yang sama sebagai collective memory memperkuat kebangsaan tersebut. Bangsa adalah landasan sosiopsikologi, landasan sosiokultural serta landasan sosiopolitik yang diperlukan untuk terbentuknya negara nasional. Sebaliknya, negara nasional merupakan subjek utama hukum internasional yang ideal bagi eksistensi bangsa. Satu bangsa akan sengsara tanpa negara dan satu negara akan labil tanpa dukungan bangsa.

BAB

VIII

NASIONALISME DAN ANCAMAN DISINTEGRASI

8.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian nasionalisme, unsur-unsur nasionalisme, tujuan nasionalisme, faktor pendorong munculnya integrasi bangsa, dan ancaman disintegrasi bangsa yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai demokratis, nilai semangat kebangsaan, nilai cinta tanah air, dan nilai cinta damai.

8.2 Materi Pembelajaran

- 8.2.1 Pengertian nasionalisme
- 8.2.2 Unsur-unsur nasionalisme
- 8.2.3 Tujuan nasionalisme
- 8.2.4 Faktor pendorong munculnya integrasi bangsa
- 8.2.5 Ancaman disintegrasi bangsa

8.3 Uraian Materi

8.3.1 Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki rasa persatuan yang timbul karena kesamaan pengalaman sejarah, serta memiliki cita-cita bersama yang ingin dilaksanakan di dalam negara yang berbentuk negara nasional.

8.3.2 Unsur-unsur Nasionalisme

Semangat kebangsaan (nasionalisme) yang ada pada diri seseorang tidak datang dengan sendiri, tetapi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut.

- Perasaan nasional
- Watak nasional
- Batas nasional (yang memberikan pengaruh emosional dan ekonomis padadiri individu).
- Bahasa nasional
- Peralatan nasional
- Agama

8.3.3 Timbulnya Nasionalisme

Nasionalisme muncul dibelahan negara-negara dunia. Akan tetapi, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda.

Nasionalisme Eropa muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Munculnya paham rasionalisme dan romantisme.
- Munculnya paham aufklarung dan kosmopolitanisme.
- Terjadinya revolusi Prancis.
- Reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Nasionalisme Asia muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.
- Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau.
- Imperialisme
- Pengaruh paham revolusi Prancis.
- Adanya kemenangan Jepang atas Rusia.
- Piagam Atlantic charter.
- Timbulnya golongan terpelajar.

8.3.4 Tujuan Nasionalisme

Pada dasarnya nasionalisme yang muncul dibanyak negara memiliki tujuan sebagai berikut :

- ❖ Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban.
- ❖ Menghilangkan Ekstremisme (tuntutan yang berlebihan) dari warga negara (individu dan kelompok).

8.3.5 Faktor Pendorong Munculnya Nasionalisme di Indonesia

Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor intern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

- Timbulnya kembali golongan pertengahan, kaum terpelajar.
- Adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan
- Pengaruh golongan peranakan
- Adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme

Faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut.

- Fahaman-fahaman modern dari Eropa
(liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme)
- Gerakan pan-islamisme
- Pergerakan bangsa terjajah di Asia
- Kemenangan Rusia atas Jepang

8.3.6 Ancaman disintegrasi bangsa

Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. (Hasan, 2013) Bila dicermati adanya gerakan pemisahan diri sebenarnya sering tidak berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasan yang mendasar dari perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah otonomi daerah, keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.

Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian, gelombang

reformasi yang tengah berjalan menimbulkan berbagai kecenderungan dan realitas baru. (Suraya, 2017)

Segala hal yang terkait dengan Orde Baru termasuk format politik dan paradigmanya dihujat dan dibongkar. Bermunculan pula aliansi ideologi dan politik yang ditandai dengan menjamurnya partai-partai politik baru. Seiring dengan itu lahir sejumlah tuntutan daerah-daerah diluar Jawa agar mendapatkan otonomi yang lebih luas atau merdeka yang dengan sendirinya makin menambah problem, manakala diwarnai terjadinya konflik dan benturan antar etnik dengan segala permasalahannya.

Dalam hal ini hukum formal itu haruslah dicermati oleh para ahli dan professional agar benar dalam kedudukannya dan benar dalam keberlakuannya supaya dapat menjamin HAM ketika terjadi berbagai konflik. (Ash-shidiqqi, 2021)

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya/kekayaan alamnya berlimpah/ berlebih, sehingga

daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. (Santosa, 2010)

Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini. Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa, sebagai akibat masih kentalnya bentuk-bentuk primodialisme sempit dari kelompok, golongan, kedaerahan bahkan agama. (Isnanta & Rahman, 2018)

Hal ini menunjukkan bahwa para elit politik secara sadar maupun tidak sadar telah memprovokasi masyarakat. Keterbatasan tingkat intelektual sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan. Bangsa ini rasanya tidak akan pernah lepas dari masalah disintegrasi, karena manusia-manusianya tidak segera sadar. Bangsa ini masih terlalu lemah untuk mengikat tali persatuan dan kesatuan dari Sabang

sampai Merauke. (Sairin, 2012)

Apalagi sekarang ini memasuki era globalisasi, dimana jalinan informasi dan komunikasi sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang baik juga terhadap kehidupan kita, karena kita sekarang lebih bisa berinteraksi dan mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan dari bangsa lain sehingga kita tidak terpuruk dalam keterbelakangan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan juga besar sekali untuk memicu terjadinya disintegrasi suatu bangsa.

Disintegrasi nasional sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat. Peran serta warga masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa ini adalah kewajiban yang jelas tertera dalam UUD 1945 (Alvian, 2021)

Masyarakat memiliki peranan penting untuk berupaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Upaya penanggulangan disintegrasi bangsa dalam menjaga persatuan Indonesia diantaranya dapat dilakukan dengan cara membangun dan

menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus dan membangun kelembagaan (pranata) yang berakarakan nilai dan norma (nilai-nilai Pancasila) yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. (Pianto, 2018)

Selain itu juga perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah serta upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.

9.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Etno Nasionalisme, penyebab Etno Nasionalisme, dampak Etno Nasionalisme bagi Indonesia, bentuk-bentuk Etno Nasionalisme yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai semangat kebangsaan, dan nilai cinta tanah air.

9.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

9.2.1 Pengertian Etno Nasionalisme

9.2.2 Penyebab Etno Nasionalisme

9.2.3 Dampak Etno Nasionalisme bagi Indonesia

9.2.4 Bentuk-bentuk Etno Nasionalisme

9.3 Uraian Materi

9.3.1 Pengertian Etno Nasionalisme

Nasionalisme Etnis atau etno nasionalisme adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau

etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun. Pengertian etno nasionalisme juga merupakan aliran kebangsaan yang didasarkan pada sentimen suku, ras, aliran seperti dasarnya. Etnisitas atau dorongan etnosentris kemudian dimanifestasikan ke bagian dalam suatu materi kebijakan yang sering disebut dengan negara bangsa. Perspektif etnis di sebuah negara, merujuk dekat perkumpulan-perkumpulan kecil yang memiliki sejarah panjang dan istiadat tersendiri dalam sebuah negara. Konsensus gerakan etno nasionalisme ini secara fundamental terdapat pada problematik politisasi kerakyatan dan primordialistik daripada masalah ekonomi. Selain pengertian di atas pengertian ada pula namanya pengertian etnonasionalisme arti sederhana adalah kesadaran sekaligus gerakan bahwa warga negara dalam sebuah negara-bangsa masih memperjuangkan dan menuntut otonomi dan/atau kemerdekaan atas nama identitas etnis dan kebudayaan yang menjadi identitasnya. (Harun Umar., M.,2020)

Pengertian etno nasionalisme juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu sebagai berikut:

➤ Etno nasionalisme menurut Peter M. Leslie

Etno nasionalisme menurut Peter M. Leslie merupakan suatu kebudayaan yang meliputi pencapaian artistik, alat dan gaya pernyataan diri, dan seluruh sistem nilai sosial agama yang mendefinisikan suatu komunitas-menjadi kontribusi pada formasi sebuah masyarakat yang berbeda, hidup berdampingan dengan yang lainnya dalam batas-batas suatu negara. Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subyektif yang memisahkan satu kelompok tertentu dengan kelompok lain dalam sebuah komunitas. (Donny .H. ,2008)

➤ Menurut Arrochman Murdiansyah

Dapat dikatakan bahwa etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subjektif yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain dalam komunitas. (Kharinda.R. , Radhi

.D. ,2018)

9.3.2 Penyebab Etno Nasionalisme

Munculnya etnonasionalisme berkaitan dengan terjadinya reaksi-reaksi dan perlawanan-perlawanan terhadap Negara yang terlalu memusat dan hegemonik, serta gerakan untuk mengubah komunitas etnis menjadi entitas politik yang bernama Negara kebangsaan (Kustanto, 2010). Menurut Arrochman Murdiansyah (2001:302). Etnonasionalisme merupakan bentuk solidaritas atau rasa komunitas yang berdasarkan etnisitas merujuk pada perasaan subjektif yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lain dalam komunitas.

Secara Psikologis orang/sekelompok orang tertarik masuk kelompok karena didasari oleh faktor-faktor, yaitu:

- Adanya kesamaan (similarity).
- Perasaan senasib (commonfate).
- Adanya kedekatan baik fisik maupun psikologi (proximity).
- Merasa dapat ancaman dari musuh (share threat)

- Motif-motif lain yang bersifat utilitarian, keuntungan bersama, pencapaian tujuan bersama

Anthony D. Smith dalam bukunya *The Ethnic Revival* mengatakan bahwa Ethnic Revival atau kebangkitan etnis secara besar-besaran sudah dimulai sejak perang dunia kedua, dunia telah menyaksikan begitu banyak reformasi etnis yang luar biasa dengan berbagai macam gerakan etnis yang menuntut otonomi yang lebih besar hingga kemerdekaan bangsanya.

Hal tersebut merupakan kebangkitan etnis yang muncul akibat dari ketidakpuasan yang amat mendalam. Kemampuan nasionalisme etnis untuk bangkit dari rasa keterasingan dan pengucilan adalah sumber daya tariknya untuk menuntut otonomi yang lebih besar atau kemerdekaan dengan upaya revitalisasi. Anthony D. Smith mencontohkan seperti yang terjadi antara etnis Eropa modern dengan Amerika Utara. Hal tersebutlah menjadi alasan utama mengapa kebangkitan etnis akan terus menimbulkan tantangan besar bagi tatanan global negara dan melibatkan transformasi nasional yang mendalam. (Kharinda .R. dan

Radhi .D. ,2018)

Etnonasionalisme ini muncul sebagai kesadaran lokal yang mengarus-utamakan kepentingan lokal dibanding kepentingan nasional. Etnonasionalisme di Indonesia semakin mendapat jalan lapang saat munculnya isu otonomi daerah yang mau tak mau mendorong kesadaran lokal.

Nasionalisme dan Etnonasionalisme tidak dapat dihindari sebagai dampak dunia global karena merupakan proses sejarah yang tak terelakkan. Nasionalisme Indonesia baru, tidak bisa memaksakan diri memilih di antara keduanya. Yang bisa dilakukan adalah menjaga nasionalisme agar tidak berada dalam tarikan ekstrem kedua proses sejarah tersebut yang dapat menjadikannya alat untuk mengeksploitasi manusia.

Anggota pendiri Indonesian Corruption Watch, menganggap bahwa nasionalisme di Indonesia baru terbentuk baru-baru saja, sekitar satu dasawarsa terlewat, sejak komunikasi antar warga jadi semakin mudah dan cepat. Ia mengatakan, faktor utama yang berpengaruh dalam membentuk baik etnonasionalisme,

nasionalisme atau universal nasionalisme adalah keintiman, kemudahan dan kecepatan komunikasi. Revolusi komunikasi hasil inovasi teknologi membuat hubungan antar personal lebih mudah tanpa memandang jarak. Tapi sebelum nasionalisme Indonesia terbentuk kuat, semakin mudah komunikasi bisa dilakukan hampir tanpa jarak, membuat beberapa daerah menyadari adanya bentuk ketidakadilan.

Rasa nasionalisme akhirnya terpecah lagi menjadi etnonasionalisme, terbukti dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang berkembang justru di jaman komunikasi serba cepat dan mudah. Sekarang ini, pemegang kekuasaan pusat negeri ini tidak bisa menganggap remeh orang-orang Papua. Dengan tren semakin canggihnya teknologi komunikasi, orang Papua yang berada di tanah mereka bisa berhubungan langsung dengan orang Papua di Jakarta, di seluruh Indonesia bahkan di ujung-ujung dunia. Jadi selama daerah merasa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada mereka, etno nasionalisme akan muncul menggerogoti nasionalisme menjadi keping-kepingan terpecah belah.

9.3.3 Dampak Adanya Etno Nasionalisme Bagi Bangsa Indonesia

Nasionalisme etnis atau etno-nasionalisme merupakan jenis nasionalisme yang mendefinisikan bangsa berdasarkan etnis. Asumsi utama dalam gagasan ini ialah kelompok etnis yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan setiap kelompok memiliki hak penentuan nasibnya sendiri. Istilah etnonasionalisme, menurut Umberto Melotti merujuk pada tipe khusus nasionalisme dan terkait dengan warga negara yang masih memimpikan kemerdekaan. Etnonasionalisme mengandung benih disintegrasi. Dalam konteks ini, etnonasionalisme tampil sebagai jeritan perlawanan terhadap ancaman dari luar. Perjuangan-perjuangan untuk self determination dan pembentukan negara terpisah dapat dianggap sebagai mobilisasi etnisitas dalam suatu bangsa. Etnonasionalisme bagi Negara Indonesia memiliki gejala konflik sosial (bernuansa etnis, rasial) tidak hanya melukai keutuhan bangsa, tetapi juga ikut mencabik kodrat suatu bangsa. Masyarakat yang terfragmentasi mulai berkembang di sejumlah Kawasan dalam negara

kita. etnonasionalisme mampu menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan kecurigaan dalam hidup bersama sebagai suatu masyarakat majemuk. Keamanan dan kedamaian dipertanyakan. Keragaman etnisitas seringkali dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang de facto berkepentingan politik terselubung. Pergesekan dan pertikaian antar etnis Indonesia membuktikan disharmoni dalam masyarakat multi etnik.

Etnonasionalisme dianggap sebagai sebuah ancaman yang tak terduga bagi negara-negara modern, khususnya Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai etnis yang berbeda mulai dari Aceh hingga Papua. Etnonasionalisme dapat dipahami sebagai paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, ras) sebagai basisnya. Etnonasionalisme ini dapat pula dipahami sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar. Karenanya, secara psikologis, gejala disintegrasi bangsa dengan basis pengertian etno-nasionalisme dapat pula dipandang sebagai fenomena "keluar-masuk" kelompok

(group formation- dissolution). Tafhel dan Turner menyatakan bahwa prinsip yang mendasar bagi sebuah kelompok sosial untuk masuk dan keluar dari sebuah kelompok adalah untuk mendapatkan sebuah evaluasi diri yang positif dari keanggotaanya dari kelompok sosial itu.

Etnonasionalisme bisa dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang berkembang di Indonesia, Dalam sebuah minoritas etnik, terutama yang kurang beruntung (dalam artian diabaikan oleh pemerintah pusat), akan tumbuh sebuah sentimen etno nasional yang merupakan fenomena positif bagi rasa keanggotaan komunitas dan perkembangan pribadi mereka, yang tidak dapat terjadi dalam konteks sosial. Hal-hal seperti ini mengakibatkan etnonasionalisme dapat mengisi kebutuhan individu atas dimensi kolektif yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pribadi. Di sisi lain etnonasionalisme juga merupakan sebuah gerakan yang tidak positif, yaitu ketika etnonasionalisme ini berkembang menjadi gerakan politik sebuah kelompok yang menuntut berdirinya pemerintahan sendiri. Inilah yang terjadi di beberapa

negara yang memiliki kelompok etnis yang banyak jumlahnya.

Konflik akibat etnonasionalisme ini pernah terjadi di dalam bangsa Indonesia diantaranya:

a. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini dikenal juga dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Penyebab munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah adanya perasaan etno-nasionalisme pada masyarakat Aceh, hal ini berawal dari konsepsi negara Indonesia, yang sebelumnya didukung oleh rakyat Aceh, warga Aceh sepenuhnya mendukung revolusi pemerintah Indonesia melawan penjajahan Belanda pada tahun 1945 dengan syarat Belanda menerapkan Nasionalisme Islam yang akan diadopsi untuk negara Indonesia setelah kemerdekaan. Sebaliknya, mantan presiden Soekarno memutuskan nasionalisme sekuler sebagai landasan fundamental negara. Berawal dari keputusan ini, warga Aceh dan

terutama pemimpin ulama terlibat pemberontakan Darul Islam yang berawal dari gerakan pemberontakan Jawa Barat. Masyarakat Aceh telah membentuk perasaan identitas kelompok yang kuat yang sayangnya tidak pernah sepenuhnya diakui oleh pemerintah pusat mengenai identitas yang bersangkutan (Bertrand, 2002, hal 19). Selain itu, kemunculan gerakan penentuan nasib sendiri di Aceh telah didorong oleh meningkatnya pelanggaran kedaulatan Aceh sejak tahun 1950an (Lane, 2002)

b. Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan untuk membantu dan melaksanakan pengakhiran pemerintahan yang berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Munculnya Organisasi Papua Merdeka(OPM), yang mana diakibatkan oleh ketidakadilan yang dilakukan pemerintahan pusat kepada masyarakat Papua yang dapat menguatkan etno- nasionalisme di Papua, hal

ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat (Jakarta) tidak dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat Papua. Masyarakat Papua merasa di marginalisasi dan di diskriminasi oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya khususnya di masa pemerintahan Orde Baru.

Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut didukung oleh kehadiran aparat militer (TNI) dan Polri yang cukup dominan dalam konteks Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya di daerah Papua disinyalir melakukan sebuah pelanggaran HAM kepada masyarakat Papua. Oleh karena itu, dalam memori kolektif rakyat Papua banyak tertanam terjadinya beberapa tindak kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan negara. Selanjutnya, kehadiran kaum pendatang (non-Papua) juga dirasakan sebagai bentuk persaingan antara OAP(Orang Asli Papua) dengan non Papua dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan agama. Eksistensi kaum pendatang cukup

mendominasi perekonomian di Papua karena keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) dan modal dibandingkan OAP. Sementara faktor agama (Islam) yaitu mayoritas kaum pendatang adalah beragama Islam, sedangkan Tanah Papua dikenal sebagai Tanah Kristen (mayoritas beragama Kristen). Program transmigrasi oleh Pemerintah Pusat juga disinyalir sebagai bentuk kolonisasi dan penyiaran agama (Islam) di Papua. (Handoko, 2019)

9.3.4 Bentuk-bentuk Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi, demikian pendapat James G. Kellas (1998: 4). Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis didasarkan pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat

berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasanya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalismeyang ekstrem seperti nasional sosialisme, pengasingan dan sebagainya. Sikap nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan

bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas psikologis yang tinggi.

Adapun bentuk bentuk nasionalisme ialah :

➤ Nasionalisme Kewarganegaraan

Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) merupakan bentuk nasionalisme yang dicirikan oleh negara yang memiliki kebenaran politik (legitimasi) dari partisipasi aktif rakyat serta perwakilan politik atau dari tingkat dimana itu mewakili “kehendak rakyat”. Istilahnya Identitas yang dibangun di sekitar kewarganegaraan bersama di dalam negara, jadi nasionalisme kewarganegaraan tidak ditentukan oleh bahasa atau budaya, tetapi oleh institusi politik dan prinsip-prinsip liberal yang

dijamin oleh warganya. Keanggotaan dalam kewarganegaraan terbuka bagi setiap warga negara, tanpa memandang budaya atau etnis, yang memiliki nilai-nilai tersebut. Singkatnya, misalnya, jika Anda adalah warga negara AS, Anda dianggap sebagai orang Amerika. Teori ini mula-mula dibangun oleh Jean- Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara tulisan yang terkenal adalah buku berjudul *Du Contract Sociale* (atau dalam Bahasa Indonesia “Mengenai Kontrak Sosial”).

Nasionalisme kewarganegaraan juga dikenal sebagai nasionalisme liberal yang mana bentuk nasionalisme ini diidentifikasi oleh para filsuf politik yang percaya pada bentuk nasionalisme inklusif yang menganut nilai-nilai liberal tradisional tentang kebebasan, toleransi, kesetaraan, dan hak-hak individu. Nasionalis Kewarganegaraan sering membela nilai identitas nasional dengan mengatakan bahwa individu membutuhkan identitas nasional untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan otonom dan bahwa pemerintahan yang demokratis membutuhkan identitas nasional

agar berfungsi dengan baik. Nasionalisme kewarganegaraan sering dikontraskan dengan nasionalisme etnis. Nasionalisme kewarganegaraan terletak dalam tradisi rasionalisme dan liberalisme, tetapi sebagai bentuk nasionalisme, ia dikontraskan dengan nasionalisme etnis. Ernest Renan sering dianggap sebagai nasionalis sipil awal. Filsuf Hans Kohn adalah salah satu orang pertama yang membedakan nasionalisme sipil dari nasionalisme etnis dalam publikasi tahun 1944-nya *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. Di Indonesia Nasionalisme kewarganegaraan merupakan bentuk kesadaran warga negara dalam keberagaman Indonesia baik berupa etnis, ras, agama, dan budaya. Dalam keberagaman tersebut warga negara sadar akan pentingnya toleransi dalam interaksi sosial. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikulturalisme dimana multikulturalisme menjadi dasar bagi terbentuknya nasionalisme kewarganegaraan suatu bangsa.

➤ Nasionalisme Agama

Nasionalisme agama (religion nationalism) merupakan salah satu jenis nasionalisme yang dicirikan suatu negara mempunyai legitimasi politik dari keberadaan persamaan agama yang dianut oleh semua element masyarakat di dalamnya. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme agama adalah hasil campuradukkan dari nasionalisme kewarganegaraan. Misalnya, di Irlandia semangat nasionalisme bersumber dari persamaan agama mereka yaitu Katolik; nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP bersumber dari agama Hindu. Namun, kumpulan nasionalis agama ini hanya sebagai simbol dan bukan sebagai motivasi utama. Hubungan antara agama dan nasionalisme tidak selalu serasi oleh karena itu masih terus menjadi perbincangan dan baik di kalangan akademisi maupun praktisi politik, khususnya yang berorientasi keagamaan. Penyebaran gagasan tentang nasionalisme yang bersumber dari Eropa ke banyak wilayah Dunia Muslim sejak awal abad 20 berujung pada

pembentukan banyak negara- bangsa (nation-state) berpenduduk mayoritas Muslim sesuai Perang Dunia II. Tetapi, pembentukan nation-state tidak mengakhiri perdebatan tentang agama dan nasionalisme. Sebaliknya, kontestasi, pergumulan dan pergolakan politik tentang kedua entitas ini terus berlanjut sampai hari ini dan ke depan. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat keagamaan berbarengan dengan perubahan politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional membuat perdebatan tentang agama dan nasionalisme kembali mengemuka.

Perdebatan mengenai agama dan nasionalisme hingga hari ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Agama merupakan bentuk keyakinan umat manusia kepada sang Pencipta, sehingga agama tidak mengenal batasan geopolitik. Sedangkan nasionalisme merupakan perwujudan atas kesadaran geopolitik umat manusia. Di belahan dunia manapun terjadi diskursus antara agama dan nasionalisme, tidak terkecuali dengan Indonesia. Berbicara mengenai nasionalisme Indonesia tidak

bisa dilepaskan dari Pancasila. Pancasila merupakan representasi nasionalisme Indonesia. Umat beragama yang hidup di Indonesia dengan menjalani nilai-nilai Hal ini terbukti bisa mengayomi seluruh elemen yang ada di Tanah Air, baik agama, suku, ras, dan antar golongan. Pancasila juga merupakan upaya negara untuk mendialogkan antara agama dan nasionalisme. Meskipun kedua entitas tersebut berbeda, akan tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurut Muh. Hatta peran agama dalam negara sebagai perkakas. Negara tidak lengkap jika tidak ada agama. Begitu juga dengan agama, agama memerlukan sebuah negara agar umat beragama bisa menjalankan agamanya dengan aman dan nyaman.

Di dalam negara Pancasila, orang akan dituntut untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, karena hal ini merupakan perwujudan dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Kaelan, selaku guru besar Filsafat Pancasila, sila pertama merupakan inti dari Pancasila. Melalui sila pertama orang akan diajarkan

tentang persatuan, perbedaan, musyawarah, etika dan moralitas, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya di agamanya masing-masing. Jadi, ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama juga terkandung dalam Pancasila. Aktualisasi ajaran universal dari agama dibutuhkan untuk memperkuat nasionalisme. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan karena saat ini banyak orang yang bersikap eksklusif terhadap agamanya, terutama kelompok Islam radikal. Banyak dari mereka yang menghakimi orang lain karena berbeda faham, mendiskriminasi kaum minoritas, bersikap truth claim terhadap agamanya. Sikap-sikap seperti ini justru tidak mencerminkan nilai universal suatu agama. Upaya menghormati dan menghargai perbedaan merupakan wujud dari sila Persatuan Indonesia. Persatuan dalam keragaman merupakan salah satu langkah awal untuk mensukseskan adanya musyawarah antar golongan. Dan, dengan persatuan, warga negara bisa mengupayakan untuk

keadilan ekonomi. Tanpa ada persatuan tidak akan ada musyawarah mufakat, kesejahteraan ekonomi juga tidak akan terealisasikan. Setiap agama memiliki sistem moral dan etika, terutama hubungannya dengan antar manusia. Dalam agama selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Gus Dur pernah mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, orang lain tidak akan menanyakan apa agamamu. Ajaran seperti ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dengan berbuat baik, interaksi sosial antar manusia akan terjalin dengan baik. Hubungan baik antara manusia menunjukkan bahwa dia memiliki adab dan etika dalam berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa martabat manusia dalam sila kemanusiaan juga diperhatikan dengan penuh. Tanpa ada ajaran tentang kemanusiaan, baik dalam ajaran agama maupun Pancasila, orang akan bertindak semena-mena. Tidak menghargai perbedaan yang ada, melakukan diskriminasi terhadap orang lemah, dan melakukan tindakan yang justru merampas hak

individu maupun kolektif, ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Padahal dalam agama, kita diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, membantu orang lain, tanpa memandang identitas yang melekat pada orang yang kita bantu.

Nasionalisme agama yang didorong secara ideologis mungkin tidak harus ditujukan terhadap agama-agama lain, tetapi dapat diartikulasikan sebagai tanggapan terhadap modernitas dan, khususnya, nasionalisme sekuler. Memang, nasionalisme agama dapat mengartikulasikan dirinya sebagai biner nasionalisme sekuler. Negara-bangsa yang perbatasannya relatif baru atau yang telah mengalami kolonialisme mungkin lebih rentan terhadap nasionalisme agama, yang mungkin berdiri sebagai representasi identitas yang lebih otentik atau "tradisional". Dengan demikian, ada kebangkitan nasionalisme agama secara global setelah berakhirnya perang dingin, tetapi juga sebagai politik pascakolonial (menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar, tetapi

juga berurusan dengan realitas perbatasan yang didefinisikan secara kolonial, dan karena itu agak artifisial) menjadi tertantang. Dalam skenario seperti itu, menarik rasa nasional identitas Islam, seperti dalam kasus Pakistan (lihat teori dua negara) dan Indonesia, dapat berfungsi untuk mengesampingkan ketegangan regional. Bahayanya adalah ketika negara memperoleh legitimasi politik dari ketaatan pada doktrin-doktrin agama, hal ini dapat membuka celah bagi elemen, institusi, dan pemimpin agama yang terang-terangan, membuat seruan terhadap agama lebih 'otentik' dengan membawa interpretasi teologis yang lebih eksplisit ke dalam kehidupan politik. Dengan demikian, imbauan agama sebagai penanda etnisitas membuka celah bagi interpretasi yang lebih nyaring dan ideologis tentang nasionalisme agama. Banyak nasionalisme etnis dan budaya memasukkan aspek agama, tetapi sebagai penanda identitas kelompok, daripada motivasi intrinsik untuk klaim nasionalis.

➤ Nasionalisme Budaya (cultural nationalism)

Bentuk nasionalisme budaya dicirikan dengan mempunyai kebenaran politik yang berasal dari arti budaya bersama dan kondisi ini tentu saja bukan berasal dari “sifat keturunan”. Nasionalisme Budaya merupakan sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya “sifat keturunan” dan juga nasionalisme budaya ini menempati posisi tengah yaitu diantara nasionalisme etnis dan nasionalisme kewarganegaraan. Oleh karena itu, ini berfokus pada identitas nasional yang dibentuk oleh tradisi budaya dan bahasa yang sama, tetapi tidak pada konsep nenek moyang, ras, atau etnis yang sama. Seperti misalnya ras, warna kulit, dan lain lainnya. Nasionalisme budaya umumnya mengacu pada gagasan dan praktik yang berhubungan dengan kebangkitan yang dimaksudkan dari budaya komunitas nasional yang diakui. Jika nasionalisme politik difokuskan pada pencapaian otonomi politik, nasionalisme budaya difokuskan pada penggarapan suatu bangsa. Di sini visi bangsa bukanlah organisasi

politik, melainkan komunitas moral. Dengan demikian, nasionalisme budaya berangkat untuk memberikan visi tentang identitas, sejarah, dan nasib bangsa.

Kunci nasionalisme budaya adalah intelektual dan seniman, yang berusaha menyampaikan visi bangsa mereka kepada masyarakat luas. Kebutuhan untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan visi ini cenderung dirasakan paling akut selama masa pergolakan sosial, budaya dan politik yang dihasilkan dari perjumpaan dengan modernitas. Nasionalisme budaya mencakup perasaan kebanggaan budaya yang dimiliki orang dalam suatu masyarakat. Masyarakat ini biasanya merupakan susunan etnis yang beragam dari orang-orang yang memiliki kepercayaan budaya yang sama dan bahasa yang sama tetapi bukan ras atau nenek moyang yang sama. Masyarakat yang "beraneka ragam etnis" biasanya didefinisikan sebagai masyarakat dengan banyak kelompok etnis yang masing-masing terdiri dari persentase populasi yang cukup besar. Dengan demikian masyarakat- masyarakat ini

memiliki budaya bersama bahkan ketika mereka tidak memiliki karakteristik yang sama secara historis dari suatu kelompok nasional. Karakteristik ini terutama adalah ras dan etnis, cara kelompok biasanya dipisahkan sepanjang sejarah. Oleh karena itu, gagasan dan perasaan nasionalisme budaya dibangun di atas cita-cita dan norma budaya bersama di antara masyarakat. Cita-cita dan norma bersama ini dapat mencakup ideologi politik, pengakuan hari raya, masakan khusus dan unik, dll. Gagasan utama nasionalisme budaya lainnya adalah bahasa bersama dari kelompok orang. Sementara masyarakat yang secara etnis dan ras homogen biasanya juga berbagi bahasa yang sama, masyarakat nasionalistik budaya biasanya memiliki bahasa yang sama dan ras orang yang berbeda yang juga berbicara bahasa asli dari masyarakat atau negara sebelumnya bersama dengan bahasa yang sama. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, perasaan nasionalisme budaya tidak terbatas pada masyarakat yang beragam secara etnis, meskipun lebih umum dan lebih mudah untuk didefinisikan

sebagai etnis yang berbeda hidup berdampingan satu sama lain dalam masyarakat tersebut menciptakan payung budaya. Orang-orang dalam masyarakat yang secara etnis homogen mungkin merasa bangga dengan ideologi politik masyarakat misalnya, tetapi tidak peduli atau mengidentifikasi perasaan bangga terhadap etnis umum dari masyarakat itu, memberikan definisi teknis nasionalisme budaya.

➤ Nasionalisme Kenegaraan

Nasionalisme kenegaraan adalah variasi dari nasionalisme kewarganegaraan yang berkaitan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik warga negara yang kuat sebagai keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan diri sendiri. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan suatu negara. Unsur terpenting dari nasionalisme negara adalah kewilayahan dan regulasi negara. Negara memiliki wilayah yang berkedaulatan yang mengatur warga negaranya berdasarkan

kebijakan yang terdapat didalam peraturan perundang- undangan. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Kejayaan suatu negea itu selalu kontras dan berkonflik dengan prinsip masyarakat demokrasi. Contohnya yakni Nazisme, serta nasionalisme Turki kontemporer, dan dalam wujud yang semakin kecil, suatu kebijakan atau peraturan otoriter yang terjadi di spanyol pada zaman Francisco, serta sikap Jacobin (Partai politik) terhadap unitaris dan golongan pemusat negeri Perancis, seperti juga nasionalisme masyarakat Belgia, yang secara tegas menentang demi mewujudkan hak kesetaraan (equal rights) dan semakin otonomi untuk golongan Alexander Fleming seorang ilmuan asal skotlandia, dan nasionalis Basque (etnik) atau Korsika (wilayah pulau). Secara sistematis, apabila nasionalisme kenegaraan itu kuat, akan wujud suatu tarikan yang berkonflik untuk kesetiaan masyarakat, dan terhadap wilayah, seperti nasionalisme Turki dan

penindasan kejamnya terhadap nasionalisme Kurdi (gerakan politik), dimana terjadinya pemberontakan di pemerintahan pusat yang kuat di Spanyol dan Perancis dengan nasionalisme Basque (etnik), Catalan (ideology yang menegaskan bahwa catalan adalah suatu bangsa), dan Corsica (wilayah pulau). Nasionalisme Romantik

Nasionalisme romantik (nasionalisme organik, nasionalisme identitas) merupakan lanjutan dari nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik secara semulajadi (organik) hasil dari bangsa atau ras. Nasionalisme romantik ini bergantung kepada perwujudan kebiasaan etnis yang menepati idealisme romantik. Cerita atau kisah tradisi masa lalu yang telah direka dijadikan sebagai sesuatu untuk membangun konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Grimm Bersaudara" yang dinukilkan oleh Herder yaitu koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnis Jerman. Penggabungan konseptual Romantisisme dan nasionalisme

menjadi semakin luas. Nasionalisme romantik memiliki istilah-istilah yang cukup besar. Pada tahun 1800 munculnya suatu gerakan dimana berbagi keadaan politik dan sosial yang berkejolak pada periode itu, dan memiliki banyak peran penting yang sama. Komposer seperti Liszt dan Rimsky Korsakov, Doets line fi dan Wergeland, novelis seperti Hendrik Conscience dan Felix Dahn, sejarawan seperti Michelet dan Palacky, folklorist seperti Grimm, Asbjornsen dan Moe, adalah nama penting dalam sejarah baik Romantik maupun gerakan nasional Eropa. Lalu Isaiah Berlin dan Hans Kohn mulai membahas sejarah intelektual nasionalisme, interaksi dan tumpang tindih dengan Romantisisme telah menjadi kebiasaan, terutama, tentu saja, dalam kasus Jerman di mana interaksi antara intelektual dari generasi Romantis dan Befreunatkriese anti-Napoleon terlalu jelas untuk diabaikan bahkan untuk diteliti. Hubungan antara Romantik dan nasionalisme dapat dilihat sebagai hubungan situasional yang mana keduanya muncul secara

bersamaan, di satu bagian dunia tertentu pada satu momen sejarah tertentu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan dari berbagai ciri-ciri umum, interaksi, dan arus silang.

10.1 Kemampuan Capaian Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya strategi pembinaan integrasi nasional, strategi pembinaan integrasi nasional, hambatan pengimplementasian strategi pembinaan integrasi nasional, prioritas kebijakan pemerintah untuk mewujudkan integrasi nasional yang berbasis nilai karakter toleransi, nilai demokratis, nilai cinta tanah air, dan cinta damai.

10.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

10.2.1 Pentingnya strategi pembinaan integrasi nasional

10.2.2 Strategi pembinaan integrasi nasional

10.2.3 Hambatan pengimplementasian strategi pembinaan integrasi nasional

10.2.4 Prioritas kebijakan pemerintah untuk mewujudkan integrasi nasional

10.3 Uraian Materi

10.3.1 Pentingnya Strategi Pembinaan Integrasi Nasional

Strategi pembinaan integrasi nasional perlu dilakukan dikarenakan masyarakat yang terintegrasi secara baik adalah hal yang menjadi harapan bagi setiap negara. Karena integrasi masyarakat menjadi tolak ukur sebuah kondisi yang digunakan negara dalam membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika suatu masyarakat negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. (Astawa, 2017)

Integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan di dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh negara Indonesia yang merupakan negara berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri.

Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terkenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang trend baru meskipun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud.

Untuk negara berkembang, tuntutan integrasi ini juga menjadi persoalan yang bukan saja dikarenakan prilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa tersebut. Negara-bangsa (*nation state*) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan.

Ikatan dan kesetiaan etnik merupakan suatu hal yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Jika ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau dapat dikatakan terganggu, mereka akan dengan mudah dan berupaya kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai dampaknya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa. Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu dihadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, 2016)

Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan juga kuat maka akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan mereka juga berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan (identitas nasional) misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi

nasional, dan sebagainya. (Dr. Drs. Ismail, 2020)

10.3.2 Strategi Pembinaan Integrasi Nasional

Permasalahan mengenai integrasi nasional merupakan permasalahan yang pasti dialami oleh setiap negara, terutama oleh negara-negara yang masih berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (*nation state*) ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. (Humanika A., 2013)

Dengan demikian usaha untuk mewujudkan integrasi nasional yang notabene didasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melawati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Dalam rangka mengupayakan

terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang dapat dijalankan, yaitu:

1. Strategi Asimilasi
2. Strategi Akulturasi
3. Strategi Pluralis

Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Masing-masing dari strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme memperlihatkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dalam upaya untuk mewujudkan integrasi nasional tersebut. (Kusrahmadi S., 2017)

2.1.1 Strategi Asimilasi

Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak

lagi identitas masing-masing budaya yang membentuknya. Saat asimilasi ini dijadikan strategi dalam integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengusahakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar membaur menjadi satu dan tidak lagi memperlihatkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.

Dengan demikian strategi yang tampak dalam upaya untuk mewujudkan integrasi nasional dapat dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang dapat terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu di dalam masyarakat.

Kendati demikian hal itu juga turut ambil bagian dalam strategi pemerintah negara untuk mengintegrasikan masyarakatnya, yakni dengan cara merekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Ditinjau dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam

mewujudkan integrasi nasional.

2.1.2 Strategi Akulturasi

Akulturasi merupakan proses meleburnya dua macam kebudayaan atau lebih hingga mewujudkan kebudayaan yang baru, tetapi pada kebudayaan baru yang terbentuk tetap terlihat ciri-ciri dari budaya lama. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya pembentuknya. Jika akulturasi ini dijadikan strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah dari suatu negara, dapat diartikan bahwa negara tersebut mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengusahakan adanya identitas budaya bersama tetapi dengan tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal.

Strategi yang terlihat menunjukkan bahwa upaya dalam mewujudkan integrasi nasional dilaksanakan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa

terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya.

Dihat dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal.

2.1.3 Strategi Pluralis

Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk

tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai.

Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

10.3.3 Hambatan Pengimplementasian Strategi Pembinaan Integrasi Nasional

Pengimplementasian strategi pembinaan integrasi nasional memiliki kendala dan hambatan tersendiri dalam mewujudkan integrasi nasional. Hambatan strategi pembinaan integrasi nasional masi terkait dengan ancaman integrasi nasional baik ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, yang berpotensi menyebabkan disintegras bangsa. Ancaman yang dimaksud tersebut dapat muncul dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam pelaksanaan strategi pembinaan integrasi nasional yang dilakukan pemerintah agar menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah kesatuan republik Indonesia, banyak upaya yang dilakukan dalam proses tersebut di antara menggunakan strategi ingerasi, strategi asimilasi, akulturasi dan pluralis. Ketiga strategi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pengimplemtasiannya Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat yang heterogen, memiliki banyak perbedaan dan keberagaman baik suku, agama, budaya, bahasa, ras, etnik, dan lain sebagainya. selain itu juga kondisi geografis indonesia berbentuk kepulauan yang yang terpisah oleh wilayah lautan sehingga menimbulkan banyak perbedaan di tiap daerahnya.

Perbedaan dan keberagaman inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik/ kendala yang akan menjadi hambatan dalam pengimplentasian strategi pembinaan integrasi nasional di indonesia. Dapat dilihat Indonesia menerapkan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional bangsa dimana paham ini menunjukkan bahwa setiap perbedaan dapat hidup

rukun bersama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Setiap kebudayaan dapat berkembang dan melestarikan kebudayaan ditengah masyarakat dengan tetap menghormati perbedaan yang ada agar tercipta masyarakat yang harmonisasi, selaras dan seimbang.

Strategi pembinaan integrasi nasional masyarakat Indonesia telah tertuang dalam Pancasila dimana dalam Pancasila terkandung nilai-nilai falsafah hidup bangsa Indonesia dan dalam sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Pemerintah melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai cara diantaranya melalui jalur pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk membentuk manusia yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD NRI 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen negara kesatuan Republik Indonesia. (PP No.32 tahun 2013, pasal 77 J ayat (1)).

Adapun kendala yang menjadi hambatan dalam strategi pembinaan Integrasi nasional pada masyarakat Indonesia

- Kondisi masyarakat indonesia yang heterogen, beraneka ragam
- Tingginya angka Demografi atau jumlah penduduk indonesia, dan masi kurangnya kualitas SDM nya
- Pendidikan yang masi belum merata pada seluruh masyarakat indonesia
- Kondisi geografis yang luas dan berbentuk kepulauan yang terpisah oleh wilayah lautan
- Sikap etnosentrisme dibeberapa kelompok suku bangsa di Indonesia dan paham primordial masi ada dalam masyarakat indonesia
- Kurangnya toleransi antar sesama golongan dimasyarakat
- Kurangnya kesadaran masyarakat indonesia terhadap HAM dan kepatuhan terhadap hukum
- Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangaunan

- Lemahnya nilai-nilai budaya lokal atau budaya nasional akibat dari kuatnya pengaruh budaya asing
- Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin dalam menjalankan pemerintahan
- Mudah terpengaruh berita palsu atau hoax
- Strategi integrasi nasional yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa Indonesia
- Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia, menanamkan nilai dalam jiwa rakyat Indonesia kesadaran sebagai setanah air dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia
- Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme pada setiap kebijakan dan kegiatan agar tidak terjadi KKN
- Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa
- Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas

- Membentuk satuan sukarela yang ter dari unsur masyarakat TNI dan polri dalam memerangi separatis
- Melarang dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk
- Menggunakan kekuatan massa

10.3.4 Prioritas Kebijakan Pemerintah untuk Mewujudkan Integrasi Nasional

Prioritas kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang didahulukan ataupun diutamakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk mewujudkan integrasi nasional. Tapi tentu dalam mewujudkan integrasi nasional dengan prioritas kebijakan akan mengalami atau menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Namun bukan berarti tantangan dalam bidang-bidang tersebut tidak bisa diatasi.

Ancaman tersebut masih bisa untuk diatasi melalui prioritas kebijakan pemerintah diantaranya yaitu:

a. Ancaman Bidang ideologi dan politik

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman dalam bidang ideologi dan politik ialah dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Dimana yang diketahui bahwasanya Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila bisa dilakukan/dilaksanakan dengan mengamalkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari.

Adapun selain penguatan Pancasila, penguatan konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dilakukan. Agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Dilansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Damri dan Fauzi Eka Putra, beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu:

1. Mengembangkan demokrasi politik
2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar
3. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara

menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

4. Menegakkan supremasi hukum
5. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional

b. Ancaman Bidang ekonomi

Globalisasi merupakan ancaman utama dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian.

Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat.
- b. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama. Sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata

pencaharian sebagai petani.

- c. Perkonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
- d. Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral, seperti IMF dan bank dunia.
- e. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor.

c. Ancaman Bidang Sosial budaya

Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan taqwa.
- b. Penguatan tentang budaya dan wawasan nusantara melalui pendidikan formal.
- c. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri:

- 1) Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- 2) Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan.
- 3) Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan

dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna untuk mewujudkan integrasi nasional diantaranya yaitu:

- a) Pemerintah membuat sebuah sistem politik nasional yang dapat dilakukan untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang mempunyai/memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.
- b) Mewujudkan agenda otonomi daerah sebagai bentuk kemampuan desentralisasi dari pemerintah.
- c) Adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara

11.1 Kemampuan Capaian Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan Integrasi bangsa Indonesia pada zaman sebelum penjajahan, Integrasi bangsa Indonesia pada zaman penjajahan, Integrasi bangsa Indonesia pada zaman pergerakan nasional, Integrasi bangsa Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan yang berbasis nilai karakter cinta tanah air, dan nilai karakter rasa ingin tahu.

11.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

11.2.1 Integrasi bangsa Indonesia pada zaman sebelum penjajahan

11.2.2 Integrasi bangsa Indonesia pada zaman penjajahan

11.2.3 Integrasi bangsa Indonesia pada zaman pergerakan nasional

11.2.4 Integrasi bangsa Indonesia pada zaman setelah kemerdekaan

11.3 Uraian Materi

11.3.1 Integrasi Bangsa Indonesia Pada Zaman Sebelum Penjajahan

Pada masa sebelum penjajahan sebenarnya negara Indonesia sudah menunjukkan adanya rasa integrasi antar sesama masyarakat meskipun pada masa itu integrasi ini hanya sebatas kedaerahan. Kedaerahan yang dimaksud adalah terbentuknya kerajaan hindu budha dan Islam pada masa itu, sehingga ketika bangsa asing masuk para kerajaan ini sudah bersikap waspada dan siaga terhadap kedatangan pedagang asing. Masyarakat pada masa kerajaan biasanya masih patuh dan menghormati para tetinggi dari kerajaan atau daerah mereka, misalnya di tanah melayu disebut sebagai Datuk atau Tuan Tertinggi. Mereka menuruti semua perkataan sang Datuk karena mereka menganggap Datuk merupakan orang terhebat pada masa tersebut. sehingga dengan adanya petinggi ini berarti ada sebuah peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar, akibat adanya peraturan ini membuat masyarakat menjadi bersatu untuk menghindari konflik. Dengan demikian jika adanya

bangsa asing masuk ke wilayah mereka maka mereka bisa waspada dan bila warga asing tersebut bertindak semena-mena masyarakat tersebut akan bersatu melawan para warga asing tersebut.

Hal berbeda terjadi ditanah jawa model integrasi ini mengambil kisah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal dengan daerah kekuasaannya yang cukup luas. Ada beberapa wilayah pemerintahan yang dikuasai oleh Kerajaan Majapahit, yakni, konsentris pertama, merupakan wilayah inti dari kerajaan yang berarti kekuasaannya langsung diatur oleh pihak kerajaan beserta saudara-saudara kerajaan, wilayah ini meliputi, pulau Madura dan Jawa, kerajaan ini juga menerapkan sistem pajak bagi rakyatnya untuk kebutuhan hidup kerajaan. Wilayah kedua atau konsentris kedua meliputi wilayah diluar jawa. Pada wilayah kedua ini merupakan hasil dari kekalahan kerajaan lain dalam melawan Majapahit, sehingga kewajiban pada wilayah ini adalah, memberi upeti atau pajak dengan laporan rutin selama 2 tahun sekali kepada raja Majapahit pada kala itu dan konsentris ketiga berasal dari wilayah kerajaan sahabat yang merupakan

hubungan diplomatik dengan kerajaan Majapahit. Wilayah Majapahit dapat luas juga dikarenakan, adanya tekat dan sumpah dari seorang panglima kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada yang dikenal dengan sumpah Palapa. Kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Akan tetapi setelah Hayam Wuruk wafat kerajaan ini mengalami kemunduran. Dari cerita diatas dapat diyakinkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia sudah ada sebelum adanya bangsa asing yang menyerang. Hal ini karena adanya pengaruh kerajaan besar pada masa Hindu-Budha dan Islam, seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kutai, dan Samudera Pasai.

11.3.2 Integrasi Bangsa Indonesia Pada Zaman Penjajahan

Hingga akhir abad XIX berbagai kerajaan kesukuan berjuang melawan integrasi kekuasaan kolonial Belanda dengan menggunakan cara nasional perlawanan bersenjata. Perlawanan yang dipimpin oleh penguasa kerajaan atau elit lokal bersama rakyat

mereka berakhir dengan kekalahan, hingga seluruh kerajaan- kerajaan tersebut dikuasai pemerintah kolonial dan menjadi wilayah taklukan Hindia Belanda (kecuali Aceh yang baru ditaklukan tahun 1913). Keruntuhan negara kolonial Hindia Belanda pada Perang Dunia II (1942) oleh serbuan Jepang, dan pendudukan Hindia Belanda oleh Jepang merubah seluruh struktur politik di Hindia Belanda. Nama Indonesia secara resmi dipakai menggantikan nama wilayah Hindia Belanda, namun secara politik wilayah Indonesia dipecah menjadi tiga kekuasaan militer Jepang: Sumatera di bawah Angkatan Darat (Tentara Ke-25), Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat (Tentara Ke-16), sedang wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di bawah Angkatan laut (Armada Selatan Ke-2). Meskipun di bawah kekuasaan Jepang Indonesia kembali dijajah. namun proses integrasi bangsa justru mencapai tonggak yang sangat penting, karena ikrar Sumpah Pemuda secara faktual diakui oleh pemerintah militer Jepang, dengan tujuan agar rakyat mendukung peperangannya melawan Sekutu. Pelarangan bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang secara

bebas melalui retriika para pemimpin dan media massa, semakin meningkatkan rasa kebangsaan dan persatuan.

Berakhirnya perang Dunia II dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri bebas dari kekuasaan penjajah siapa pun. Momentum untuk menyatakan kemerdekaan kepada dunia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika terjadi *vacum of legitimate power*, karena Jepang yang kalah tidak lagi sah memerintah, dan Sekutu yang menang belum lagi datang. Saat itu merupakan tonggak sejarah yang monumental bagi proses integrasi bangsa Indonesia. Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman dimana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di

masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional. Negara kita, memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan itu tidak serta merta membuat kita bebas dari penjajahan. Pada saat itu, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda bahkan tidak mengakui hasil Perjanjian Linggarjati yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Alih-alih, Belanda melancarkan serangan yang dikenal sebagai Agresi Militer. Akibatnya, kedaulatan dan persatuan bangsa terancam dan memicu adanya perlawanan di berbagai daerah. Masa-masa ini disebut sebagai masa revolusi fisik yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Karena, selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang juga berjuang untuk mempersatukan NKRI yang dipecah-belah oleh Belanda. Untuk meredam konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB yang diwakili oleh Komisi Tiga Negara menengahi

perundingan yang diadakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Perwakilan Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara perwakilan Belanda diketuai oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan tersebut dinilai menguntungkan bagi Belanda karena Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

Hasil perundingan ini mendapat kecaman dari rakyat Indonesia dan menyebabkan Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri dan menjadi pihak oposisi yang menentang pemerintah. Amir Syarifuddin kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncak dari perlawanannya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan tersebut memicu pemberontakan-pemberontakan di wilayah Indonesia lainnya. Pemberontakan-pemberontakan ini dipicu oleh perbedaan ideologi dan keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Para pemberontak ingin mengganti konsep negara menjadi negara Islam atau mengganti

ideologi bangsa menjadi ideologi komunis. Selain itu, masih ada pihak yang ingin membentuk negara feodal atau kerajaan. Pemberontakan-pemberontakan dalam negeri ini tentunya mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa yang saat itu baru merdeka. Untungnya, pemerintah Indonesia berhasil meredam pemberontakan-pemberontakan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dengan membentuk pasukan khusus yang meredam pemberontakan-pemberontakan tersebut. Sehingga, semenjak tahun 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan dan persatuan bangsa pun dijaga dengan integrasi bangsa.

Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan

yang sama. Dengan kata lain integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia.

11.3.3 Integrasi Bangsa Indonesia Pada Zaman Pergerakan Nasional

Pergerakan Nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan yakni pada kurun 1908-1945. Mengapa 1908 dijadikan sebagai tahun awal?, alasannya karena pada masa inilah perjuangan yang dilakukan rakyat termasuk dalam kategori berviisi nasional. Artinya pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini, masih bersifat kedaerahan atau sebatas masing-masing memperjuangkan kelompoknya masing-masing. Timbulnya kesadaran baru dengan cita-cita nasional disertai lahirnya organisasi modern sejak 1908, menandai lahirnya satu kebangkitan dengan semangat yang berbeda. Dengan demikian, masa awal perjuangan bangsa periode ini dikenal pula dengan sebutan kebangkitan nasional.

Istilah pergerakan nasional lainnya juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan (masa revolusi fisik). Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Istilah pergerakan identik dengan istilah movement dalam bahasa Inggris. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional, karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia. Artinya, pergerakan tersebut merupakan refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memperhatikan ketika itu. Mencapai kemerdekaan bersama sebagai bangsa, merupakan cita-cita nasional dan usaha terorganisir ini adalah sebuah pergerakan nasional.

Ada tiga istilah yang melekat pada eksistensi perjuangan mencapai kemerdekaan di Indonesia tersebut, yakni pergerakan nasional, kebangkitan nasional, dan kebangunan nasional. Dua istilah terakhir

cenderung berkonotasi penggambaran atas satu situasi awal atau hanya melukiskan sebuah momentum penting, sedangkan istilah pertama lebih bersifat dinamis serta menunjukkan suatu aksi. Istilah kebangkitan dan kebangunan, lebih tepat untuk menggambarkan pergerakan modern awal. Dengan demikian, istilah pergerakan sepertinya lebih pas untuk melukiskan proses dan arah perjuangan bangsa dalam kurun 1908-1945 ini. Sartono Kartodirjo menggunakan istilah “Kebangunan Nasional”, tatkala melukiskan dimulainya fase baru dalam sejarah perjuangan bangsa yakni berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia (Jakarta). Menurutnya, kelahiran organisasi ini didasarkan atas pengalaman- pengalaman masa lampau dengan model perlawanan bersifat lokal tidak efektif. Karena itu, dalam fase ini timbul kesadaran mendalam akan persatuan dengan menghimpun secara terorganisir segenap potensi perjuangan yang ada. Moedjanto menguraikan ciri perjuangan atau perlawanan dari rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusantara sebelum dan setelah 1900, sebagai berikut: (1) Sebelum 1900; perjuangan rakyat

berciri perlawanan atau perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal, menggantungkan pada tokoh kharismatik, dan belum ada tujuan yang jelas; (2) Setelah 1900; perjuangan rakyat berciri perjuangan bersifat nasional, diplomasi, dan perjuangan dengan organisasi modern.

Pergerakan nasional yang mewujud sebagai buah protes atas sejumlah penindasan kaum kolonial pada rakyat di Nusantara selama bertahun-tahun, bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba dalam fase sesaat. Akan tetapi, melewati serangkaian proses mulai dari bentuknya yang relatif sederhana (tradisional) dengan semangat kedaerahan, hingga pergerakan dalam kategori modern dengan rasa sebangsa sebagai energi penggerakannya. Dengan demikian, untuk menjelaskan penyebab timbulnya harus dihubungkan bersama sejumlah prakondisi baik penyebab langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak literatur, penyebab langsung disebut faktor dalam negeri (internal), sedangkan penyebab tidak langsung dinamakan faktor luar negeri (eksternal). Beberapa faktor penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri (internal), antara lain digambarkan

sebagai berikut:

- ❖ Adanya tekanan dan penderitaan yang terus menerus, sehingga rakyat Indonesia harus bangkit melawan penjajah;
- ❖ Adanya rasa senasib-sepenanggungan yang hidup dalam cengkraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk Negara;
- ❖ Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air dan hak menentukan nasib sendiri.

Tekanan dan penderitaan terus menerus yang dimaksud merupakan akumulasi dari sejumlah tindakan kaum penjajah, mulai dari Bangsa Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang. Belanda merupakan penjajah terlalu lama menanamkan pengaruhnya di Nusantara, sehingga berbagai bentuk penindasan yang membuat rakyat menjadi miskin, menderita, dan tertinggal telah menjadi catatan hitam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perlakuan sejenis yang dialami bersama itulah menimbulkan perasaan senasib dan akhirnya menjelma menjadi semangat untuk membentuk sebuah negara. Kesadaran akan pentingnya

kebersatuan untuk mewujudkan impian bersama (membebaskan diri dari belenggu penjajah), pada gilirannya membentuk kesadaran nasional. Mengenai pembentukan nation dapat dijelaskan dengan mengacu pada beberapa teori. Pertama, teori kebudayaan (cultuur) yang menyebut suatu bangsa atas dasar persamaan kebudayaan pada sekelompok manusia. Kedua, teori negara (staat) yang menentukan terbentuknya suatu Negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada di dalamnya disebut bangsa. Ketiga, teori kemauan (wils) bersama dari kelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Kemauan sebagai buah dari kesadaran subyektif rakyat untuk menentang penjajah dan membebaskan diri dari belenggu penderitaan, tereproduksi dari sentimen kelompok sederhana menjadi rasa sebangsa dan setanah air. Rasa ini mewujud dalam kerangka kepentingan (citacita) yang sama sebagai pihak yang menderita bersama di bawah tekanan hegemoni kaum kolonial selama betahuntahun lamanya. Artinya, mereka berjuang bukan lagi berbasis

solidaritas sesuku/seetnik, tetapi sebagai rasa sebangsa yang terjajah.

Pada tingkat nasional, nasionalisme dapat didefinisikan sebagai peralihan dari pandangan sosial yang ahistoris kepada sikap yang lebih historis. Kehidupan sosial- politik bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya secara alamiah, melainkan sesuatu yang dibangun dengan keputusan dan tindakan sendiri. Bahkan pada tingkat ini pula nasionalisme dapat didefinisikan sebagai peralihan dari provinsialisme yang partikularistik kepada sikap dan kesadaran nasional yang lebih terbuka, dan terjadilah pergantian closed society oleh open society. Dalam konteks perubahan seperti inilah kesadaran nasional dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia sejak kelahiran Budi Utomo 1908 hingga menjelang masa proklamasi kemerdekaan akan menjadi inti kajian. Satu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa ketiga prakondisi atau faktor internal penyebab timbulnya gerakan nasional, tidak terkonstruksi secara tunggal. Akan tetapi merupakan bagian integral tak terceraiakan dari sejumlah kondisi lainnya. Munculnya faham-faham baru berupa liberalisme, demokrasi, dan

nasionalisme pasca Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, tidak terlepas dari terjalinnya hubungan antara Eropa dengan Asia terutama sejak pembukaan terusan Suez. Di mana komunikasi lintas benua ini, menjadi media penyebaran isme-isme termasuk semangat nasionalisme di kalangan bangsabangsa Asia tak terkecuali Indonesia. Demikian pula penerapan sistem pendidikan Barat di Hindia Belanda menciptakan kaum terpelajar dan elit baru yang berpikiran modern serta kemenangan Jepang atas Rusia memicu lahirnya rasa percaya diri di kalangan kaum pribumi untuk berjuang menentang penjajah. Bahkan gerakan Turki Muda dan Gerakan Pan-Islamisme, memberi andil penting atas proses perwujudan semangat kebangsaan di kalangan kaum pribumi. Berbagai gerakan bervisi menjalin persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa itulah yang menciptakan sikap anti-penjajah dan pada gilirannya menjadikan organisasi-organisasi pergerakan dalam berbagai bentuknya sebagai alat untuk meraih kemerdekaan.

Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Tujuan organisasi pergerakan nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama. Pada jangka waktu tertentu terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional. Bahkan setelah organisasi tersebut lemah atau tumbang kemudian kebangkitan muncul kembali untuk membuat organisasi pergerakan baru yang lebih kuat. Organisasi Pergerakan Nasional sebagai

berikut:

1. Budi Utomo

Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. oleh Soetomo seorang mahasiswa STOVIA atau sekolah dokter Jawa. Pendirian Budi Utomo ini atas anjuran dr. Wahidin Soedirohusodo. Selain berjuang dalam bidang sosial dan pendidikan, Budi Utomo juga berjuang dalam bidang politik dengan memperjuangkan didirikannya Volksraad atau Dewan Rakyat. Dewan tersebut merupakan badan perwakilan yang anggotanya orang Indonesia. Atas usulan Budi Utomo, Dewan Rakyat didirikan pada tahun 1908.

2. Sarekat Islam

Sarekat Islam pada awalnya adalah Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada akhir 1905. Setelah HOS Cokroaminoto masuk menjadi anggota dan pengurus, organisasi ini berubah nama menjadi Sarekat Islam. Walaupun organisasi ini berbasis Islam namun perjuangannya bersifat nasional dan memiliki tujuan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Serikat islam

berkembang dengan sangat pesat pada masa itu. Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir. Ketika serikat Islam meminta badan hukum kepada pemerintah kolonial, Gubernur Jenderal Idenburg menolaknya. Idenburg hanya memberikan badan hukum pada cabang SI di daerah dengan pertimbangan SI lokal tidak akan membahayakan politik pemerintahan kolonial. Meskipun demikian, pada tahun 1916 SI diberi badan hukum oleh pemerintah kolonial.

3. Indische Partij

Organisasi ini didirikan oleh keturunan Indo (keturunan Indonesia dan Belanda) dan nasionalis pribumi. Pendiri organisasi ini adalah Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (EFE Douwes Dekker) atau juga dikenal sebagai Danudirja Setiabudi. Ia adalah keluarga jauh Edward Douwes Dekker atau yang kita kenal sebagai Multatuli. Selain EFE Douwes Dekker, pendiri lainnya adalah Soewardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai. IP dikenal

sebagai partai yang sangat nasionalis. Partai ini terbuka terhadap semua golongan tanpa membedakan asal usul keturunan, agama, dan sosial ekonomi. Tujuan partai ini sangat jelas dan tegas yaitu mencapai Indonesia merdeka. Perlawanan secara politis yang dilakukan partai ini menyebabkan ditangkapnya para tokoh pendiri IP. Para tokoh tiga serangkai ditangkap pada 4 Mei 1913 dan Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang.

4. Perhimpunan Indonesia (Indische Vereeniging)

Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia didirikan di Belanda oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada mulanya mereka tidak berpolitik, hanya bertujuan belajar. Pada perkembangannya muncul perasaan ingin bersatu di antara orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Supaya lebih menunjukkan ke-Indonesiannya, organisasi ini mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada 3 Februari 1925. Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka adalah organisasi pergerakan nasional. Indische Social Democratische Vereeniging

(ISDV).

Didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Henk Sneevliet, anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda dan rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme dan berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Pada Desember 1920 berubah nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI diketuai oleh Semaun. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian dikalahkan oleh kolonial Belanda.

5. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah organisasi bentukan Ir. Soekarno pada 4 Juli 192 yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian setelah kongres 1928, keanggotaan PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda khawatir. Akhirnya empat tokoh PNI, yakni Soekarno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh pengadilan Bandung pada 29 Desember 1929. Tujuan utama PNI adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan

Indonesia. Namun berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berangsur membubarkan diri.

6. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan. Tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern, panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin, sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

7. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia

Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia adalah organisasi yang muncul berkat titik terang pengaruh adanya Budi Utomo yang membawa dampak bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Tahun 1914 kemudian berdiri perkumpulan Pasundan dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya pada 16 Agustus 1927 dibentuklah organisasi Persatuan Minahasa di bawah pimpinan dr. Tumbelaka dan Sam ratulangi.

8. Organisasi Kepanduan

Lahir pula organisasi perkumpulan kepanduan, selain organisasi pemuda yang berupa lanjutan dari induk organisasi-organisasi asalnya. Organisasi ini awalnya hanya menghimpun kelompok pemuda yang gemar olahraga saja. Organisasi yang pertama kali lahir adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) pada tahun 1916 di Solo. Setelah itu lahir pula organisasi bernama Neda Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada tahun 1917 di kalangan anak-anak keturunan Eropa dengan. Selanjutnya,

setelah tahun 1920, organisasi kepanduan ini semakin berkembang yang mengikuti perkembangan paham nasionalisme.

9. Taman Siswa

Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara kultural yang diselenggarakan dengan baik. Taman siswa menjadi tonggak penataan pengembangan pendidikan nasional untuk sampai seperti saat ini. Organisasi ini dijalankan dengan demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Organisasi ini pulalah yang meningkatkan kesadaran peran pendidikan nasional penting untuk mencapai kemerdekaan.

10. Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Sarekat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk SI merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember

1920. Hingga kemudian pada 13 November 1926 partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tetap bisa dikalahkan oleh Kolonial Belanda. Bersamaan dengan munculnya PKI ini juga lahir Marxisme Belanda di bawah pimpinan Sneevliet. Pergerakan politik partai ini adalah organisasi politik yang radikal, sehingga keberadaannya dilarang oleh pemerintah Belanda.

11. Partai Indonesia (Partindo)

Partai Indonesia lahir karena Partai Nasional Indonesia (PNI) telah menjadi partai terlarang, sehingga tokoh-tokoh nasionalis membentuk panitia untuk membentuk partai baru. Pada 1 Mei 1931, dibawah kepemimpinan Sartono lahirlah perkumpulan baru yang bernama Partai Indonesia. Organisasi ini berharap agar pengikut PNI dulu ikut bergabung kembali. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno bergabung dalam organisasi ini, pengikut Partindo pun semakin berkembang. Hal tersebut rupanya membuat pemerintah Belanda kembali was-was, hingga akhirnya Soekarno kembali ditangkap dan

dibuang ke Ende pada 1 Agustus 1933.

12. Gerakan Wanita

Gerakan Wanita dipelopori oleh R.A Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini kemudian dikenal dengan Emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsawanan Kartini. Dari sinilah Kartini mulai merealisasikan ilmu yang ia pelajari dari barat untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Maka munculah pergerakan dari kaum wanita Indonesia. Selain itu ada pula sekolah keutamaan Istri yang diselenggarakan oleh Raden Dewi Sartika di daerah Pasundan dan berdiri pula organisasi kewanitaan bernama Sopa Tresna di Yogyakarta.

11.3.4 Integrasi Bangsa Indonesia Pada Zaman Setelah Kemerdekaan

Berakhirnya Perang Dunia II dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri, bebas dari kekuasaan penjajah siapapun. Momentum untuk menyatakan kemerdekaan

kepada dunia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika terjadi vacuum of legitimate power, karena Jepang yang kalah tidak lagi sah memerintah, dan Sekutu yang menang belum lagi datang. Saat itu merupakan tonggak sejarah yang monumental bagi proses integrasi bangsa Indonesia. Secara yuridis formal bangsa Indonesia dikukuhkan menjadi satu nation pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara RI dengan dasar Pancasila yang digali oleh Soekarno, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dilengkapi dengan lambang Garuda Pancasila bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika." adalah perwujudan formal dari integrasi nasional Indonesia (Rahardjo, 2001:7-28). Ia merupakan Imagined Community yang dulu dicita-citakan oleh para pemuda yang berikrar pada tahun 1928, dan diidam-idamkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Soekarno, salah seorang Bapak Bangsa Indonesia, telah berjasa merumuskan nilai-nilai kepribadian bangsa ini menjadi dasar negara.

Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan sebagai kultur normatif dan alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan menentukan orientasi tujuan serta sistem sosiopolitik pada tingkat makro dan menentukan kaidah-kaidah yang mendasari pola kehidupan individual. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi faktor determinan bagi kehidupan moral berbangsa, tetapi juga memberikan landasan ideologis bagi berbagai unsur dalam masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistis itu. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang menjadi komponen dari nasionalisme sebagai dasar untuk memperjuangkan realisasi dari integrasi nasional Indonesia

(Kartodirdjo, 1990: 32-33). Revolusi nasional yang terjadi antara tahun 1945 hingga 1949, dan penyatuan ke arah negara kesatuan RI tahun 1950 adalah batu ujian pertama apakah integrasi nasional yang telah kita deklarasikan menjadi realitas, atau masih merupakan masyarakat yang imajiner. Integrasi setelah kemerdekaan di Indonesia terjadi secara vertikal maupun horizontal/antargolongan.

Integrasi Vertikal

Melalui revolusi nasional bangsa Indonesia terbukti mampu mempertahankan baik kemerdekaan negara, kesatuan wilayah (kecuali Irian Barat yang baru terintegrasi tahun 1963), maupun kedaulatan pemerintah. Tantangan berat, selain mempertahankan kedaulatan negara dari penjajahan asing, adalah membangun baik integrasi vertikal (elit-massa) antara pemerintah dan rakyat di daerah, antara elit politik dan massa pengikut, maupun integrasi horizontal: penyatuan daerah-daerah ke dalam wilayah RI dan hubungan antarsuku serta golongan. Berkaitan dengan integrasi vertikal, sangat menarik bahwa reaksi daerah terhadap proklamasi kemerdekaan dan berdirinya negara RI disambut positif pertama-tama justru oleh kelompok-kelompok lokal yang tergabung dalam organisasi lokal, ataupun yang memiliki jaringan dengan organisasi di pusat, bukan dari pemerintah lokal yang masih dalam situasi status quo dan menunggu. Pergerakan nasional yang tumbuh di Jakarta sebagai pusat kolonial telah

mampu membangun jaringan dengan kelompok-kelompok progresif di daerah, menjadi faktor penting sebagai penyalur ide-ide kemajuan dan semangat kebangsaan dengan membuka cabang di daerah. Di samping itu masyarakat lokal pun memiliki dinamika tersendiri dalam menanggapi arus kemajuan, baik melalui pendidikan swasta, madrasah atau pesantren, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang lain, di bawah pimpinan tokoh-tokoh lokal. Jaringan pusat-daerah ini semakin kokoh pada masa pendudukan Jepang, meskipun dengan membonceng kegiatan propaganda untuk memperoleh dukungan perang. Dinamika internal dan eksternal inilah yang membuat gaung kemerdekaan bergema di daerah, dan direspons secara positif, meskipun dengan intensitas yang berbeda.

Cukup mengambil contoh dua daerah di luar Jawa yang rawan disintegrasi, Aceh adalah satu-satunya daerah yang tidak diduduki Belanda pada masa revolusi (1945- 1949). Hanya dua bulan setelah Proklamasi Aceh, telah membuat maklumat

"berdiri di belakang maha pemimpin Soekamo" (bergabung dengan RI) yang ditandatangani oleh para pemimpin ulama Aceh, antara lain Tengku Daud Beureueh. Hal ini karena secara historis telah terbangun jaringan elit-massa antara pergerakan nasional yang berpusat di Jawa dengan di Aceh. Selain itu dari Sarekat Islam membuka cabang pada tahun 1916, Insulinde pada tahun 1918, organisasi lokal Sarekat Aceh berdiri tahun 1918. Dan dinamika lokal sekolah-sekolah Islam formal modern didirikan tahun 1919, sedang pemuda-pemuda Aceh dikirim ke sekolah Muhammadiyah di Jawa, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PIJSA) yang progresif didirikan tahun 1939. Rakyat Aceh memberi dukungan sangat besar bagi eksistensi negara RI (Alfian, 1999:200- 204). Contoh terakhir adalah Irian Barat. Dari namanya yang terus berubah-ubah (hingga 1962 bernama Nieuw Guinea, 1963-1970 Irian Barat 1970- 1999 Irian Jaya, 1999 hingga kini Papua Barat) mencerminkan wilayah paling 14 ujung timur Indonesia ini menjadi ajang perebutan pengaruh politik.

Pihak Indonesia menghendaki pengakuan kedaulatan kepada RI meliputi seluruh wilayah bekas Nederlandsch Indie, termasuk Irian Barat. Secara kebetulan kesadaran kebangsaan Indonesia telah tertanam sejak tahun 1944 pada tokoh-tokoh muda Irian Barat oleh tokoh-tokoh politik yang dibuang di Digul. Lewat para "kader" inilah tumbuh berbagai organisasi seperti Komite Indonesia Merdeka (KIM) dan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan tokoh-tokoh politik pro Indonesia, yang menjadi pendukung integrasi ke Indonesia.

Bersama-sama bangsa Indonesia yang lain mereka berhasil membebaskan Irian Barat pada tahun 1962. Pihak Belanda yang tidak ingin menyerahkan Irian ke Indonesia, mempersiapkan sebuah negara Papua dengan membentuk aparat sipil dan militer, bahkan Dewan Papua. Namun sebelum itu terlaksana Irian Barat lebih dahulu berintegrasi ke Indonesia. Sementara itu sebagian besar penduduk Irian masih hidup dalam ikatan suku-suku yang sangat alamiah, terpencar-pencar tanpa sarana perhubungan modern. Sebagian

mereka yang terpelajar dan bekas pegawai Belanda ingin mendirikan negara Papua Barat. Maka sejak berintegrasi, rakyat Irian terbelah menjadi tiga kelompok kesetiaan: setia kepada RI, setia kepada imagined community negara Papua, atau setia kepada suku masing-masing (Kaisiepo, 1993; Adicondro, 1993; Sjamsuddin, 1989). Dari contoh-contoh di atas tampak bahwa proses integrasi nasional Indonesia pada batu ujian pertama cukup berhasil.

Integrasi Horizontal / Antar golongan

Selain integrasi vertikal, integrasi horizontal, dalam hal ini integrasi antargolongan atau kelas masyarakat perlu kita cermati. Revolusi ternyata juga memakan anak sendiri. Perubahan sosial yang mendadak, berskala luas dan berjangka lama telah mengguncang struktur masyarakat lama. Revolusi nasional yang berdimensi politik di beberapa daerah menjalar ke revolusi sosial, konflik antar golongan dan antarkelas masyarakat yang tajam dan berdarah.

Di Aceh persaingan pengaruh dan kekuasaan antara ulama (pemimpin agama dan moral) dan uleebalang (pemimpin daerah dan adat) memuncak pada masa revolusi. Tuduhan bahwa uleebalang setelah perang Aceh memihak Belanda karena diangkat menjadi kepala daerah, menyimpan rasa dendam di kalangan ulama refoimis, apalagi ketika ternyata uleebalang diangkat menjadi kepala daerah oleh pemerintah RI. Dalam situasi *vacum of power* pada akhir tahun 1945 hingga tiga bulan awal 1946 konflik berdarah tak terelakkan antara laskar pemuda, pendukung penuh ulama melawan para uleebalang dan pejabat pemerintah, yang berakhir dengan kekalahan total pihak uleebalang. Sejak itu pemerintahan RI dipegang oleh golongan ulama atas pilihan rakyat (Morris, 1985:90-98). Revolusi sosial juga terjadi di beberapa daerah lain, dengan kelompok-kelompok yang berbeda dan faktor-faktor penyebab yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama: mengubah struktur kekuasaan feodalistik tradisional menjadi demokratik.

Di daerah Tegal, Pemalang, dan Pekalongan terjadi penculikan dan pembunuhan para pamong praja, dari bupati hingga kepala-kepala desa oleh pemuda. Para pamong praja ini dituduh sebagai pengikut Belanda dan kolaborator Jepang, dua penjajah aging yang membawa kesengsaraan kepada rakyat petani melalui eksploitasi ekonomi, yaitu eksploitasi tanah dan tenaga kerja petani oleh pabrik-pabrik gula. Pada masa kolonial ketiga daerah tersebut memang merupakan konsentrasi pabrik gula yang menyewa tanahsawah petani. Pada masa Jepang kembali petani disengsarakan oleh tuntutan penyerahan padi besar-besaran untuk logistik perang, dan pengerahan tenaga kerja untuk pembangunan prasarana (romusha), yang menyebabkan kelaparan dan kematian. Semua "dosa-dosa" ini ditimpakan kepada pamong praja hingga kepala desa, karena merekalah yang memerintahkannya. Aksi perburuan, penculikan, pembunuhan, dan penggantian oknum-oknum pamong praja dilakukan oleh para pemuda di bawah pimpinan tokoh-tokoh Komunis dan Islam pada

bulan Oktober 1945 hingga Desember 1945. Para pemuda kemudian mengangkat pemimpin-pemimpin mereka menjadi kepala daerah (bupati Brebes dan Tegal), dan memilih tokoh-tokoh lain (dari partai Masyumi dan PNI) yang mereka anggap populis menjadi pamong praja yang baru, dan mengganti para lurah dengan orang-orang yang dianggap bersih. Gerakan revolusi sosial ini baru dapat dihentikan ketika TKR sebagai aparat keamanan pemerintah, bersama-sama dengan kelompok Islam yang lain melakukan operasi pemulihan keamanan. Namun demikian, sebagian besar para kepala daerah dan pamong praja pilihan rakyat tetap dipertahankan. Ini menandakan terjadinya perubahan ke arah demokratisasi di bidang birokrasi daerah, sebagai buah dari revolusi, dengan cara revolusioner pula. (Lukas, 1989; Lukas, 1985: 23-46).

Kesimpulannya melalui pengalaman revolusi nasional bangsa Indonesia dapat mencapai integrasi politik secara vertikal, sementara melalui revolusi sosial telah terjadi proses integrasi sosial, meski harus melalui konflik berdarah. Lebih lanjut lagi,

setelah kemerdekaan kita juga harus mempertahankan integrasi dan mengembangkannya yaitu, pada hakikatnya faktor utama keberhasilan integrasi nasional tahun 1950 adalah karena kesamaan tujuan, yang mana membebaskan diri dari penjajahan dan kesamaan cita-cita untuk membangun masyarakat baru yang lebih sejahtera.

Untuk itu semua suku dan golongan bersedia menyatukan persamaan-persamaan dan melupakan perbedaan-perbedaan. Dengan kata lain faktor tunggal ika lebih dikedepankan daripada faktor bhinneka. Ketika integrasi nasional tercapai dan bangsa Indonesia akan membangun masyarakat baru, terjadi persaingan antara kekuatan-kekuatan persatuan (tunggal ika) yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan perbedaan (bhinneka). Artinya, kepentingan bangsa sebagai keseluruhan, yang diwakili pemerintah Pusat, berhadapan dengan kepentingan subbangsa di daerah, dengan kekhususan dan identitas masing-masing. Dialog antara "Pusat" dan "Daerah" ternyata tidak selalu berjalan lancar. Konsekuensi sebagai satu negara

kesatuan meniscayakan demi kesatuan dan persatuan bangsa dialog harus dimenangkan oleh pusat, at all costs. Masalah- masalah daerah dan kecenderungan sentrifugal yang membawa konflik pusat dan daerah seringkali terpaksa diselesaikan dengan kekuatan senjata, karena kita terlanjur memiliki tradisi kekerasan dalam menyelesaikan masalah daripada melalui dialog dan perundingan untuk mencapai kesepakatan, seperti pada contoh konflik-konflik yaitu :

- a. Konflik pusat-daerah
- b. Peristiwa G 30 S
- c. Gerakan Separatis
- d. Disitegrasi sosial, ekonomi, dan budaya

12.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pluralitas, bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia, bentuk perbedaan agama di Indonesia, bentuk perbedaan budaya, unsur kebudayaan, faktor perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia, peran dan fungsi perbedaan budaya dan perbedaan pekerjaan di Indonesia yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai demokratis, nilai semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air.

12.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

- 12.2.1** Pengertian pluralitas
- 12.2.2** Bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia
- 12.2.3** Bentuk perbedaan agama di Indonesia
- 12.2.4** Unsur kebudayaan
- 12.2.5** Faktor perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia

12.2.6 Peran dan fungsi perbedaan budaya

12.2.7 Perbedaan pekerjaan di Indonesia

12.3 Uraian Materi

12.3.1 Pengertian Pluralitas

Kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu fenomena sosial yang universal atau umum dan dapat dijumpai disetiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diakui atau tidak, disadari atau tidak. Kata “plural” berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jamak”, ketika kata ini ditambah akhirnya menjadi “pluralitas” ini berarti kemajemukan. Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal atau satu. Menurut Muhammad Imarah (1999: 9) pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan kekhasan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya lebih dari satu (banyak) hal, keragaman menunjukkan bahwa lebih dari satu keberadaan itu berbeda, heterogen, atau bahkan tidak dapat dibedakan.

Konsisten dengan konsep pluralitas ada juga konsep pluralisme, yang isinya hampir sama dengan membahas pluralisme dan keragaman. Keberagaman merupakan kebutuhan yang tidak dapat disangkal.

12.3.2 Bentuk Puralitas Masyarakat Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang dari manusia pertama yang hidup di Nusantara hingga lahir sebagai negara berdaulat yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah panjang ini memiliki berbagai bentuk sumber daya alam dan manusia. Keanekaragaman sumber daya manusia di Indonesia diwujudkan dalam populasi yang beragam dan sangat beragam, meliputi berbagai suku, ras, agama, masyarakat, budaya, tingkat ekonomi, kecenderungan politik, dll. Mengenai jumlah suku bangsa di Indonesia, para peneliti memiliki pendapat yang berbeda. Hildred Geertz menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat dari 300 suku. 1 Sedangkan Skinner, seperti dikutip Nasikun, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 35 suku yang masing-masing mempunyai adat dan bahasa yang berbeda-beda. Ia juga menyebutkan lima suku

yang tergolong besar yaitu: Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau dan Bugis.² Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan mengakui lima agama untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Di luar lima agama resmi tersebut, masih terdapat ideologi dan kepercayaan lain seperti: Konghuchu, aliran kepercayaan, kejawen dan lain- lain. Selain itu, pada masing-masing agama di atas terdapat banyak mazhab yang diikuti oleh para pendukungnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak ragam budaya. Hal itu terlihat dari adat istiadat, pola hidup, interaksi sosial, bahasa sebagai alat komunikasi dan lain-lain. Beragamnya budaya Indonesia tersebut selain dilatar belakangi oleh suku yang berbeda-beda budaya juga akibat dari pengaruh luar yang diminati oleh penduduknya. Budaya asing dan agama yang masuk sangat berpengaruh terhadap penciptaan budaya baru yang terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Agama Hindu yang datang dari India, agama Islam dari Arab, agama Kristen dari Eropa serta agama Budha dari negara-negara Indocina sangat berpengaruh dalam

proses pembentukan budaya di Indonesia sampai sekarang. Pierre L. van den Berghe, seperti dikutip Nasikun, menyebutkan karakteristik masyarakat majemuk sebagai berikut:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
4. Secara relatif sering mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Para ahli Sosiolog menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari 13.000 pulau. Letak suatu komunitas penduduk yang terpisah dari yang lain telah menyebabkan lahirnya berbagai tradisi, bahasa, mode interaktif, gaya hidup, kecenderungan, dan lain-lain. Merupakan satu kelompok yang terisolasi dari kelompok lain yang pada akhirnya membentuk suku dan ras yang berbeda. Kedua, kepulauan Indonesia yang terletak di antara Indonesia dan Samudra Pasifik membuka wilayah tersebut untuk jalur pelayaran internasional. Hal ini menyebabkan pengaruh negara dan peradaban asing terhadap penduduk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari multi-agama di Indonesia. Ketiga, faktor ekologi dan iklim yang berbeda bertanggung jawab atas diversifikasi regional Indonesia. Struktur tanah pertanian serta curah hujan yang tidak sama menyebabkan munculnya sistem pertanian yang tidak sama antara beberapa daerah di Indonesia.

12.3.3 Bentuk Perbedaan Agama di Indonesia

Bangsa Indonesia ialah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia ini dilihat dari satu sisi yaitu pada sisi banyaknya agama yang dipeluk dan yang diyakini oleh penduduk Indonesia. Adapun agama yang diakui di Indonesia ada 6 yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Masa era Order Baru, Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Konghucu di Indonesia.

Hal ini terbukti saat era Order Baru dengan dibangunnya lima tempat ibadah agama dalam satu areal di Puja Mandala Nusa Dua Bali, diantaranya:

Agama Hindu pada sisi paling timur, agama Kristen Protestan di sebelah Barat agama Hindu, agama Buddha disebelah Barat agama Kristen Protestan, Agama Katolik di sebelah Barat agama Buddha, dan paling Barat adalah agama Islam. Keragaman tersebut telah menjadi kenyataan sosial keagamaan yang sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa yaitu bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dari Pancasila ataupun UUD NRI 1945, pada hakikatnya menjadi jaminan bagi eksistensi agama dan kepercayaan di Indonesia artinya masing-masing agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia harus dijamin oleh Negara dan diperbolehkan untuk mengikuti kepercayaan yang dianutnya. Hubungan masyarakat dengan agama ini sangat erat secara kesatuan dan

mempengaruhi satu sama lain. Terkandung sumber nilai dan moral universal dalam agama yang dapat menjawab tantangan kehidupan dengan membentuk perilaku dan sikap manusia.

Kemudian jika agama dikaitkan dengan kata pluralisme, artinya akan berubah menjadi pluralisme agama dan dari terminologi istilah pluralisme agama sudah menjadi baku. Sikap saling menghormati keunikan masing-masing dan juga sikap toleransi merupakan makna dari pluralisme. Pluralisme agama memandang semua agama setara dengan agama-agama yang lainnya dan terhadap pluralitas agama yang menjadi sebuah paham dan cara pandang semua agama adalah sama. Masalah antar teologi, sejarah, primordialisme, muncul akibat pluralisme agama di Indonesia yang saling tarik menarik, ketika umat beragama sendiri berada dalam lingkungan intern pluralisme berhadapan dengan masalah teologi, baik Islam, Budha, Protestan, Hindu, Konghucu, Khatolik, dan agama lainnya, dengan melupakan aspek esoteris agama-agama ada dan masih mempersoalkan truth claim (klaim kebenaran).

Komposisi Agama di Indonesia

	Persentase (dari populasi total)	Angka Absolut (juta)
Muslim	87.2	207.2
Kristen	6.9	16.5
Katolik	2.9	6.9
Hindu	1.7	4.0
Buddha	0.7	1.7
Konghucu	0.05	0.1

1) Islam

Indonesia merupakan salah satu negara yang populasi muslim terbesar di dunia sekitar 13% umat Muslim dari berbagai dunia tinggal di Indonesia dan hal ini menunjukkan bahwa hampir 90% masyarakat Indonesia ialah beragama Islam. Namun, walaupun mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam salah satu teori sejarah menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M. Artinya, Islam telah menghiasi negeri ini dengan melewati satu masa. Jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia sendiri telah terbentuk ke dalam berbagai agama dan kepercayaan. Tidak hanya Islam, agama-agama lainnya pun berdatangan. Di sisi negara, pada saat ini ada enam agama yang diakui, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan

Konghucu. Selanjutnya umat Muslim di Indonesia ini telah mencapai 207 juta orang yang sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia ini beraliran Sunni, kitab dari agama Islam sendiri yaitu Al-Qur`an dan Islam mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu yaitu Allah. Ummat Islam ini memiliki tempat ibadah yaitu Masjid, di Masjid umat Muslim bisa melaksanakan kegiatan spiritual yaitu seperti sholat, membaca Al-Qur`an, berdzikir, dan lain sebagainya.

Namun, walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih adanya dominasi dari agama non Islam dan membuat hukum Islam tidak bisa dilaksanakan secara penuh di Indonesia.

Adapun Pulau-pulau Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim :

1. Sumatra
2. Jawa
3. Kalimantan (daerah pesisir)
4. Sulawesi
5. Lombok

6. Sumbawa

Islam sendiri memiliki peranan strategis dalam membina dan membentuk generasi mudanya serta umat Islam dalam memperkuat integrasi sosial. Umat Islam ini memiliki tanggung jawab juga dalam membina dan memperjuangkan integrasi sosial. Secara konseptual teoritis, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai keragaman dan toleransi terhadap pluralitas. Sebagai wahyu yang diturunkan bagi manusia, Islam telah menjadikan doktrin menyejarah dalam pluralitas.

Dalam Islam, pluralitas aliran keagamaan diterima sebagai kenyataan sosiohistoris. Pluralitas seperti ini adalah gejala umum terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pluralitas dalam berfikir, berperasaan, bertempat tinggal, dan berperilaku. Sumber dari Islam itu sendiri sesungguhnya bersifat tunggal, yakni bersumber dari dan bersandar pada Allah yang satu. Namun, ketika doktrin itu mensejarah dalam masyarakat dan realitas kehidupan masyarakat, maka pemahaman, penafsiran, dan pelaksanaan sepenuhnya bersandar

pada realitas tersebut. Manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda dalam pemikiran maupun kehidupan sosial- ekonomi, budaya, politik, dan geografis.

2) Kristen Protestan

Selanjutnya adalah Kristen Protestan, agama Kristen Protestan merupakan agama terbesar kedua di Indonesia. Agama ini berkeyakinan bahwa mereka memiliki Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Hari besar yang dirayakan oleh umat kristiani yaitu natal, jum`at akbar, paskah dan kenaikan yesus kristus, umat Kristen sendiri memiliki tempat ibadah yaitu Gereja. Selanjutnya agama Kristen ini masuk di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda lebih tepatnya saat VOC pada sekitar abad ke-16 telah berkembangnya Kristen Protestan di Indonesia Kebijakan VOC yang melakukan perubahan pada Katolik dengan sukses, berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama Kristen Protestan berkembang pesat pada abad ke-20 yang ditandai dengan kedatangan para misionaris

dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut sensus penduduk tahun 2018, yang didapat dari data Kementerian Agama tahun 2018 tercatat 7,60% penduduk Indonesia beragama Kristen Protestan (20.246.267 jiwa). Sekitar 10% dari populasi Indonesia terdaftar sebagai umat Kristen, sebuah persentase secara absolut mencakup kira-kira 23,5 juta orang. Dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran- ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Komunitas-komunitas Kristen tersebar secara tidak merata di seluruh negeri. Namun, kebanyakan dari komunitas ini bertempat tinggal di wilayah Timur Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah.

Di kalangan umat Kristen, telah timbul sikap terhadap pluralisme yaitu :

1. Pertama, model kaum konservatif-Injili, yang memahami bahwa hanya ada satu agama yang benar dan agama yang benar itu harus memenuhi ukuran kitab suci Kristen atau Alkitab. Menurut Alkitab bahwa hanya Yesus yang menjadi Juru

selamat. Agama-agama lain tidak menyediakan keselamatan itu. Pandangan ini dapat disebut inklusif-mutlak atau ekstrim.

2. Kedua, model kaum Protestan arus utama, yang mengutamakan pandangan positif dan sikap dialogis terhadap agama-agama lain. Kaum ini mengakui adanya pernyataan umum (bukan hanya yang partikular di dalam Yesus Kristus), yaitu dalam penampakan alam semesta ini. pernyataan umum Allah ini dapat juga berwujud dalam budaya atau agama-agama yang ada. Pandangan ini tidak menerima bahwa di dalam agama-agama lain ada keselamatan karena agama-agama itu menganjurkan agama dan penganutnya mencari keselamatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, tidak berdasarkan iman kepada Tuhan.

3) Kristen Katolik

Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang denominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di kepulauan Maluku. Orang

Maluku ini menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Pada tahun 2018, 3,12% dari penduduk Indonesia adalah Katolik, lebih kecil dibandingkan para penganut Protestan. Mereka kebanyakan tinggal di Papua dan Flores. Selain di Flores, kantong Katolik yang cukup signifikan adalah di Jawa Tengah, yakni kawasan sekitar Muntilan, Magelang, Klaten, serta Yogyakarta. Selain masyarakat Jawa, iman Katolik juga menyebar di kalangan Tionghoa. Di Indonesia, terdapat satu provinsi yang mayoritas penduduknya adalah penganut Katolik yaitu NTT dengan persentase 54,14% dari populasi penduduk provinsi tersebut

Kemudian Katolik ini berbeda dengan Protestan walaupun sama-sama berkeyakinan bahwa juru selamat mereka adalah Yesus Kristus, berikut perbedaan dari Kristen Protestan dan Katolik :

1. Dalam ajaran Katolik, Maria lebih dari sekedar wanita yang melahirkan Yesus. Maria berperan penting dalam keselamatan umat beriman. Jika tidak ada Maria atau dahulu

Maria menolak mengandung Yesus maka peristiwa keselamatan tidak akan pernah terjadi. Itulah mengapa dalam ajaran Katolik, Maria memiliki peran yang besar. Bahkan Katolik memiliki doa-doa dan devosi khusus untuk Maria seperti Doa Novena Tiga Salam Maria, Doa Rosario, dan masih banyak yang lainnya.

2. Pemimpin Agama

Dalam agama Kristen Protestan pemimpinnya yaitu pendeta, yang mana diperbolehkan untuk menikah, memiliki anak kandung, dan keluarga inti. Sedangkan pemimpin Agama Katolik tidak. Pastor atau Romo yang merupakan pemimpin umat Katolik dilarang untuk menikah alias hidup memiliki keluarga, begitu pun untuk biarawan dan biarawatnya tidak boleh menikah.

3. Pengakuan Santo dan Santa

Poin ini merupakan hal yang paling membedakan antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Agama Kristen

Protestan atau yang lebih dikenal dengan Kristen tidak mengakui adanya Santo dan Santa. Berbeda dengan umat Katolik, keberadaan Santo dan Santa merupakan hal penting. Santo dan Santa merupakan orang kudus yang sampai akhir hidupnya memberikan teladan yang baik dalam iman. Ada yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan bahkan rela mati memperjuangkan imannya kepada Tuhan. Nama Santo dan Santa juga dijadikan nama Baptis umat Katolik dan dalam harapan mereka supaya umat Katolik meneladani cara hidup kudus dari Santo dan Santa.

Di kalangan umat Katolik pun, telah timbul sikap terhadap pluralisme yaitu salah satunya adalah model kaum Katolik, mereka menganggap bahwa ada banyak jalan tetapi ukurannya satu, yaitu Yesus Kristus. Allah menghendaki keselamatan manusia karena kasih-Nya. Bersamaan dengan itu, ada gereja atau persekutuan orang Kristen sebagai

sarana keselamatan. Jadi gereja juga menjadi ukuran. Karena itu, orang bisa selamat karena kasih Allah, tetapi karena ia tidak hidup dalam struktur Kekristenan, maka dia disebut “Kristen tanpa nama”. Model ini sudah menunjukkan pandangan yang inklusif.¹⁷ Berbagai pendekatan tematis dalam menghadapi pluralitas agama telah dipergunakan, yaitu: pertama, teosentris yang mengutamakan pembahasan tentang Allah yang mengadakan perjanjian dengan nabi Nuh dan Abraham, yang berarti juga memasukan agama-agama lain yang satu keturunan dengan kekristenan, yaitu Yahudi dan Islam. Pendekatan teosentris ini menampakkan pandangan dan sikap yang inklusif terhadap pluralitas; bahwa agama-agama yang ada berada pada satu lingkungan dan kehidupan bersama yang semuanya berasal dari satu akar atau leluhur bersama, dan dari Tuhan yang sama. Pandangan ini memahami bahwa jalan menuju pusat ada

banyak, tapi pusatnya hanya satu

4) Hindu

Berdasar dari data Badan Pusat Statistik, agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% penganut atau kisaran lebih dari 4 juta lebih penganut agama hindu, dengan pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda dan Veda yang memiliki makna sebagai ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna dan kekal abadi serta berasal dari Hyang Widhi Wasa. Untuk hari raya Umat Hindu, adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Adapun Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu misalnya hari raya Galungan, hari raya Nyepi, dan hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan.

Dalam konteks pluralitas, jika ditinjau lebih dalam, para ahli tentang sejarah agama mengatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti

adanya intoleransi beragama di dalam agama Hindu. Pertentangan agama jarang dijumpai dan pertukaran agama terjadi dalam suasana damai dan dengan tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Agama Hindu bersifat filosofis dan oleh karena itu dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Dengan demikian, agama Hindu bersifat toleran. Bahkan ada yang berpendapat bahwa toleransinya terlalu besar. Penganut agama Hindu menyadari betapa pluralitas tidak bisa dihindarkan dari kehidupan, setiap manusia membawa pluralitasnya masing-masing. Kesadaran ini menjadi aktualisasi nilai pertama "Pluralitas Hindu" yakni Vidya, yang dalam konteks ini dimaknai sebagai pengetahuan, pemahaman dan kesadaran dalam melihat pluralitas sebagai kenyataan dan bagian dari kehidupan.

Hindu menegaskan bahwa keragaman merupakan bagian dari sebuah kehidupan yang patut untuk senantiasa dihargai dan dijaga selayaknya kita bersikap terhadap diri sendiri

(Atharvaveda XII.1.4 5). Hindu juga menyuarakan betapa bersemangat nya dalam menyuarakan toleransi beragama kepada dunia, seperti yang disampaikan oleh Swami Vivekananda di World Parliament of Religions di Chicago pada september 1893 yang lalu. Sikap toleransi begitu penting dalam konteks pluralitas beragama, sebab hanya dengan cara itulah rasa hormat dan penghargaan itu terwujud. Toleransi dalam konteks pluralitas berarti menghormati dan menghargai keyakinan agama lainnya, serta menghindarkan diri untuk bersikap merendahkan dan menistakannya

5) Buddha

Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, Tripitaka ini terbagi menjadi tiga kelompok besar yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Berdasar data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia diperkirakan

mencapai 0,7% atau kisaran 2 juta lebih penganut. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke Vihara saat perayaan upacara keagamaan, seperti Waisak, Magha dan Asadha

Dalam agama Buddha, kemampuan untuk menerima keberagaman membutuhkan kebijaksanaan (pannya). Ketika kebijaksanaan dimiliki tiap orang maka ia akan mampu melihat segala sesuatu apa adanya (wisdom atau yatha butha nyana dasanam). Ia mampu melihat perbedaan sebagai perbedaan, persamaan sebagai persamaan. Tindakan nyata kaum buddha dalam memaknai pluralitas terbukti pada zaman Majapahit, dimana dua agama yakni Buddha dan Hindu dapat hidup saling rukun sehingga seorang Pujangga menuliskan kata-kata indah “Tan Hana Dharma Mangrwa, Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya: tidak ada kebenaran mendua, berbedabeda tetapi tetap satu jua. Kata-kata itu kini telah dijadikan pegangan hidup masyarakat Indonesia dalam melihat perbedaan suku, agama dan ras, meskipun berbeda tetap ada satu tujuan bersama.

Agama Buddha melihat keragaman sebagai kenyataan wajar bahwa segala sesuatu itu (Dharma) berbeda. Yang harus diusahakan adalah bagaimana mengupayakan realitas perbedaan itu agar tidak sampai menimbulkan konflik karena adanya rasa benci, serakah dan gelap bathin sebab semua itu justru dapat merugikan dalam hal pencapaian tujuan akhir.

6) Khonghucu

Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Khonghucu seperti yang kita ketahui sekarang bahwa agama khonghucu pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke -17, dimana salah satu buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Khonghucu di Indonesia berjumlah 0,05%. Agama Khonghucu memiliki dua kitab utama, yaitu Kitab Si Shu dan Kitab Wu Jing dan juga memiliki hari besar seperti Tahun Baru Imlek, Cap

Go Meh dan Cheng Beng.

Sebenarnya dalam agama khonghucu itu tidak membahas secara spesifik mengenai pluralitas tapi dalam hal ini agama khonghucu mempunyai pemahaman yang disebut Kosmologi Confucian yang lebih dikenal dengan sebutan Yin Yang. Dari filosofi Yin-Yang dapat diketahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa memang menghendaki adanya perbedaan di dunia ini. Agama Khonghucu mengakui bahwa Tuhan menciptakan makhluk-Nya dengan perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari fisik sampai dengan keyakinannya, Nabi Kongzi bersabda “Yang dapat diajak belajar bersama, belum berarti dapat diajak bersama menempuh jalan suci; yang dapat diajak menempuh jalan suci, belum berarti dapat diajak bersama berteguh; dan yang dapat diajak berteguh, belum berarti dapat terus bersesuaian paham” (Lunyu IX: 30). Penganut khonghucu menganggap bahwa Pluralitas hanyalah bungkus atas suatu anugerah yang sama, yaitu watak sejati.

Dengan kesadaran semua manusia, maka dalam berhubungan dengan sesama terus dipenuhi dengan semangat mengembangkan watak sejati, bukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada yang sering kali menjauhkan. Watak sejati yang menyebabkan manusia saling mendekat, hidup rukun, dan saling menghargai. “Watak sejati saling mendekatkan, kebiasaan saling menjauhkan” (Lunyu XVII: 2). Kebersamaan dalam pluralitas yang damai dan harmonis hanya dapat tercipta bila semua pemeluk agama saling menghormati dan bekerja sama dengan dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan semua manusia adalah saudara karena semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. “Di empat penjuru lautan, semuanya saudara”.

12.3.4 Bentuk Perbedaan Budaya

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur seperti

agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, karya seni dll. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.

Banyak aspek budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Sedangkan perbedaan kebudayaan yaitu perbedaan yang muncul dari suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu daerah atau negara.

12.3.5 Unsur Kebudayaan

Di dalam kebudayaan terdiri dari 7 (tujuh) unsur mendasar. Menurut Koentjaraningrat Kebudayaan mempunyai unsur-unsur yang bersifat universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia.

7 (tujuh) unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut, yaitu:

1. Sistem dan organisasi kemasyarakatan

Organisasi sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan.

2. Sistem religi dan upacara keagamaan

Sistem religi merupakan sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan.

3. Sistem mata pencaharian

Sistem mata pencaharian merupakan segala berbagai usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok

tanam, peternakan, perikanan, perdagangan.

4. Sistem (ilmu) pengetahuan

Sistem pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan tentang kondisi alam disekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang dan bilangan, sifat sifat dan tingkah laku sesame manusia, tubuh manusia.

5. Sistem teknologi dan peralatan

Yang dimaksud dengan teknologi yaitu jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan- bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Unsur teknologi yang paling menonjol yaitu kebudayaan fisik yang meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan

perumahan serta alat alat transportasi.

6. Bahasa

Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah di dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa ada dua yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan.

7. Kesenian

Kesenian merupakan segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam tiga garis besar, yaitu seni rupa, seni suara dan seni tari.

12.3.6 Faktor Perbedaan Kebudayaan Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan daerah yang luas kemudian Indonesia juga dikenal karena keunikan dan keberagaman suku bangsanya. Wilayahnya yang luas

terbentang dari Sabang sampai Merauke menyimpan beragam perbedaan suku bangsa yang memiliki keunikan dan filosofi tersendiri. Beberapa faktor perbedaan kebudayaan yang membuat Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda.

1. Faktor geografis negara kepulauan

Sebagai negara yang terdiri dari banyak kepulauan (archipelago), Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat interaksi antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing sehingga membuat kebudayaan menjadi sangat beragam antar pulau-pulau di Indonesia.

2. Faktor kondisi alam

Perbedaan kebudayaan juga disebabkan oleh kondisi geografis atau faktor alamnya. Keragaman suku bangsa dan budaya dapat terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang

letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan dan hal itu menimbulkan keragaman suku bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa pasti memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Berbagai perbedaan antar suku bangsa ini yang membentuk keanekaragaman di Indonesia.

3. Faktor transportasi dan komunikasi

Transportasi membuat interaksi antar manusia menjadi mudah untuk melakukan mobilitas atau perpindahan. Semakin mudah berinteraksi dengan suku dari pulau lain maka kebudayaan yang dimiliki suku tertentu akan menjadi lebih beragam.

4. Faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan

Perubahan proses sosial pada masyarakat termasuk kerja sama dan kemampuan masyarakat untuk menerima nilai-nilai baru yang berbeda dengan yang selama ini mereka jalani. Penerimaan

masyarakat terhadap perubahan membuat akulturasi budaya. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul dalam suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.

Kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan dikelola ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang digabungkan dengan kebudayaan setempat dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga mudah dipakai dan memberikan manfaat. Penolakan penggabungan kebudayaan hanya diterapkan terhadap sistem kepercayaan, ideologi, dan falsafah hidup.

5. Faktor pengaruh kebudayaan asing

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap

manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri- ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain.

Wilayah di Indonesia yang sangat luas juga memiliki beragam ras yang disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, hingga letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia, antara lain ras Malayan- Mongoloid yang ada di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua yaitu ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga yaitu ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.

12.3.7 Peran dan Fungsi Keberagaman Budaya

Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman budaya. Kemudian, hampir di setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda jenis dan bentuknya. Keragaman inilah yang menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pembangunan nasional. Beberapa peran dan fungsi keberagaman budaya.

○ Sebagai daya tarik bangsa asing.

Negara Indonesia menjadi salah satu pusat destinasi wisata dunia. Salah satu daya tarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia yaitu karena kekayaan budaya yang Indonesia miliki. Sebagai contoh seperti daerah Bali yang sangat sering didatangi oleh wisatawan asing, kemudian terdapat beberapa unsur yang ada di Bali yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Bali. Dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali dapat membuat perekonomian masyarakat Bali menjadi lebih baik. Kemudian, banyaknya wisatawan dapat menjadi peluang lapangan pekerjaan di berbagai sektor, seperti perhotelan, biro

perjalanan dan kerajinan tangan atau cinderamata.

○ Mengembangkan kebudayaan nasional

Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang didukung oleh warga negara, memiliki sifat yang khas dan dapat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga negara. Budaya nasional Indonesia merupakan budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu serta masih ada sampai sekarang dan berasal dari budaya daerah. Kemudian, budaya nasional juga dapat menciptakan jati diri bangsa yang kuat.

○ Saling melengkapi hasil budaya

Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia memberikan kesempatan bagi masing-masing untuk saling melengkapi. Dengan sikap saling melengkapi ini maka akan menimbulkan sikap saling mengisi untuk melengkapi kekurangan budaya-budaya yang lain, hingga tercipta inovasi baru.

○ Mendorong inovasi dan budaya

Inovasi kebudayaan merupakan kelanjutan dari saling melengkapi kebudayaan yang bertujuan untuk membuat kebudayaan menjadi lebih baik.

○ Sikap toleransi yang tertanam

Keberagaman budaya Indonesia dapat membuat masyarakat belajar untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Karena keberagaman yang dimiliki ini, masyarakat menjadi sadar bahwa manusia memiliki perbedaan. Dengan memiliki sikap toleransi antar budaya, maka setiap budaya memberikan kesempatan budaya lain untuk berkembang.

12.3.8 Perbedaan Pekerjaan Di Indonesia

Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun nonformal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pekerjaan seperti ini memiliki struktur yang formal, ada bagian manajemen, ada bagian teknis atau pelaksana lapangan, dsb. Jenis pekerjaan ini tidak

mandiri karena bergantung terhadap suatu instansi tempat ia bekerja.

Pekerjaan sektor nonformal meliputi pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, apabila seorang pemilik bengkel ingin libur, ia dapat libur kapan saja. Permasalahannya, berarti ia juga tidak akan mendapatkan penghasilan. Tentunya penghasilan tetap dapat diraih jika ia telah memiliki delegasi atau karyawan jika usahanya telah maju. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah.

Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik sektor formal maupun nonformal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan guru merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pada jenis pekerjaan formal ini, individu terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Dengan demikian, mereka

bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai pedagang bakso keliling sangat tergantung pada pedagang tersebut. Apabila ingin libur, ia dapat libur sewaktu-waktu.

Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru, tidak akan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat dan polisi dapat mengalami kelaparan, demikian seterusnya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Setelah kalian mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari.

Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara-negara lain. Perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keberagaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kosa kata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosa kata bahasa Malaysia. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah Melayu yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tionghoa. Dalam bahasa Indonesia, kalian dapat menemukan berbagai istilah yang diserap dari berbagai bahasa daerah.

13.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konflik dalam masyarakat Indonesia, macam-macam konflik di dalam masyarakat Indonesia, penyebab terjadinya konflik di masyarakat Indonesia, dan cara mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berbasis karakter nilai demokratis, nilai cinta tanah air, dan nilai cinta damai.

13.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

13.2.1 Definisi konflik dalam masyarakat Indonesia

13.2.2 Macam-macam konflik di dalam masyarakat Indonesia

13.2.3 Penyebab terjadinya konflik di masyarakat Indonesia

13.2.4 Cara mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia

13.3 Uraian Materi

13.3.1 Definisi Konflik Dalam Masyarakat Indonesia

Konflik merupakan fenomena yang sudah lazim terjadi dalam manusia, baik dalam skala kecil seperti konflik individual seperti antar teman maupun skala besar seperti konflik antar negara. Konflik sendiri merupakan hubungan antara dua atau lebih pihak (individual atau kelompok) yang berasumsi bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sama atau bertentangan. Konflik biasanya disebabkan oleh motif untuk mencapai, merebut dan mempertahankan keinginan dan kepentingannya yang dilakukan dengan berbagai cara yang terkadang merugikan orang lain.

Konflik berasal dari bahasa Latin “configure” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik,

kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Selain itu faktor dari timbulnya suatu konflik juga dilatarbelakangi oleh multikultur masyarakat atau bangsa Indonesia itu sendiri, apabila dari keanekaragaman yang dimiliki masih mementingkan etnis atau antar golongan, ras, suku, agama dsb yang dimana merupakan salah satu bentuk dari keegoisan yang harus dihapuskan atau diminimalisir agar dapat mencegah maraknya atau timbulnya suatu Disintegrasi bangsa. Ada beberapa Pandangan tentang Konflik yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya sebagai berikut:

- Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan;
- Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan;

- Pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya;
- Suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; e. Suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis;
- Kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Di dalam rumusan Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yang dalam UU tersebut disebut konflik adalah: "perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional."

Konflik tentunya bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. konflik sosial yang biasa terjadi dilingkungan masyarakat adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks individual maupun kelompok. Dalam konteks individual konflik terjadi sebagai suatu pertentangan hati nurani dalam diri setiap manusia. Sedangkan konflik kelompok maupun sosial adalah pertentangan antara individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok lain secara berhadapan dalam mempertahankan kepentingan masing-masing.

Sulit dipungkiri konflik-konflik sosial itu merupakan buah dari watak kekuasaan masa lalu yang cenderung militeristik, sentralistik, dan hegemonik. Watak kekuasaan seperti itu telah menggerus kemerdekaan sebagian kelompok masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Akibat dari hal itu mereka tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan hidup secara

baik. Lebih lanjut, rasa frustrasi sosial pun akan sulit dihindarkan. Masing-masing pihak yang terlibat di dalam konflik sosial akan mengidentifikasi diri mereka sebagai korban. Identifikasi ini akan memunculkan sikap untuk saling balas dendam melalui jalur kekerasan juga jika ada kesempatan terbuka. Untuk itu diperlukan kepekaan dan kesiapan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum setempat. Sikap itu dapat mencegah konflik sosial berada dalam situasi berlarut-larut penuh ketidakpastian.

Secara konstitusional Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural, untuk mewujudkan hal tersebut banyak tantangan yang harus dihadapi, baik berkaitan dengan soal-soal kebangsaan maupun keagamaan. Masyarakat Indonesia yang majemuk, yang diwarnai keanekaragaman adat istiadat, suku, ras, dan agama serta bahasa yang berbeda-beda, sebenarnya merupakan kondisi ideal bagi terciptanya bangsa Indonesia yang kuat dan jaya, namun kemajemukan tersebut ternyata mengandung berbagai kerawanan konflik kepentingan di dalam masyarakat,

hingga saat ini hal itu sering tidak berhasil di atasi, sehingga konflik vertikal dan horizontal menjadi hal yang semakin biasa terjadi yang kadangkala diikuti dengan konflik-konflik sosial bernuansa agama di beberapa tempat, seperti Poso, Ambon, dan lainnya. Saat ini, konflik tidak hanya menunjukkan peningkatan insiden terkait sengketa tanah, namun perselisihan juga semakin marak ketika menyentuh persoalan identitas antara dua kelompok yang berbeda. Di awal reformasi, konflik tersebut masih terkait isu keagamaan dan etnisitas yang masih mendominasi. Namun hingga sekarang terdapat konflik yang bersifat politis seperti separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sosial seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Alih-alih diharapkan mengalami penurunan, jumlah konflik sosial di Indonesia justru semakin memperlihatkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah konflik sosial di Indonesia pada 2010 berjumlah 93 kasus, meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun, kemudian jumlah

konflik sosial kembali meningkat tajam menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012²². Bahkan, terdapat 189 titik yang berpotensi memunculkan konflik sosial di Indonesia dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

13.3.2 Macam-macam konflik di dalam masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk terjadinya konflik. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing, baik berupa konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal menunjuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, misalnya konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan seperti di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Umumnya konflik ini terjadi karena ketidakpuasan akan cara kerja pemerintah, misalnya konflik dengan para buruh, konflik Aceh, serta daerah-daerah yang muncul gerakan separatisme.

Terdapat berbagai macam konflik yang dikelompokkan dalam beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1. Konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya (Konflik dalam diri individu, Konflik antar-individu, Konflik antar individu dan kelompok, Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, Konflik antar organisasi, dan Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda).
2. Konflik berdasarkan fungsinya Yaitu Konflik konstruktif, adalah konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembangan organisasi. Konflik destruktif, adalah konflik yang memiliki dampak negatif kepada pengembangan organisasi.
3. Konflik berdasarkan posisi seseorang dalam struktur organisasi
 - a) Konflik vertikal, adalah konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki jabatan yang tidak sama dengan dalam organisasi.
 - b) Konflik horizontal, adalah konflik yang terjadi karena memiliki kedudukan/jabatan yang sama atau setingkat dalam organisasi.

- c) Konflik garis staf, adalah konflik yang terjadi karyawan yang memegang posisi komando, dengan pejabat staf sebagai penasehat dalam organisasi.
 - d) Konflik peran, adalah konflik yang terjadi karena individu memiliki peran yang lebih dari satu.
4. Konflik berdasarkan dampak yang timbul yaitu
- Konflik fungsional, adalah konflik yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Konflik Infungsional, adalah konflik yang dampaknya merugikan orang lain.
5. Konflik berdasarkan sumber konflik
- a) Konflik tujuan, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan individu, organisasi atau kelompok yang memunculkan konflik
 - b) Konflik peranan, adalah konflik yang terjadi karena terdapat peran yang lebih dari satu.
 - c) Konflik nilai, adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh seseorang berbeda dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok.

d) Konflik kebijakan, adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi.

6. Konflik berdasarkan bentuknya

a) Konflik realistik, adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutannya.

b) Konflik nonrealistik, adalah konflik yang terjadi karena kebutuhan yang meredakan ketegangan.

7. Konflik berdasarkan tempat terjadinya Konflik in-group, adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri dan Konflik out-group, adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan suatu kelompok atau masyarakat lain.

Soerjono Soekanto (1989:90) mengklasifikasikan beberapa bentuk dan jenis-jenis konflik yang sering kali terjadi dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Konflik Pribadi

Konflik yang terjadi dalam diri seseorang terhadap orang lain. Umumnya konflik pribadi diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain,

yang pada akhirnya melahirkan perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong tersebut untuk memaki, menghina, bahkan memusnahkan pihak lawan. Konflik pribadi merupakan jenis konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. Misalnya dua individu yang sedang adu argumentasi tentang masalah pembagian warisan dalam keluarga.

2. Konflik Rasial

Konflik rasial umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya, seperti bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit dan warna rambut. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid Negroid, dan ras-ras khusus. Hal ini berarti kehidupan dunia berpotensi munculnya konflik juga jika perbedaan antar ras dipertajam. Konflik rasial merupakan jenis konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda.

Konflik rasial akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok ras yang berbeda karena adanya kepentingan dan kebudayaan yang saling berbenturan. RG Squad bisa mengetahui lebih jauh mengenai hal ini dalam konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras di Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

3. Konflik Antarkelas Sosial

Terjadinya kelas-kelas di masyarakat karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar menempati posisi atas, sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi bawah. Dari setiap kelas mengandung hak dan kewajiban serta kepentingan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dapat terjembatani, maka situasi kondisi

tersebut mampu memicu munculnya konflik rasial.

4. Konflik Politik Antargolongan Dalam Satu Masyarakat Maupun antara Negara yang Berdaulat.

Dunia perpolitikan pun tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Politik adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Perbedaan ini memunculkan peluang terjadinya konflik antargolongan terbuka lebar. Contoh rencana undang-undang pornoaksi dan pornografi sedang diulas, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua pemikiran, sehingga terjadi pertentangan antara kelompok masyarakat yang setuju dengan kelompok yang tidak menyetujuinya.

5. Konflik Bersifat Internasional

Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut

kedaulatan negara yang saling berkonflik. Karena mencakup suatu negara, maka akibat konflik ini dirasakan oleh seluruh rakyat dalam suatu negara. Misalnya, perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat.

13.3.3 Penyebab terjadinya konflik di masyarakat Indonesia

Dalam proses terjadinya Konflik terdapat factor yang mempengaruhinya, ahli sosiologi Indonesia Soerjono Soekanto menyatakan terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau akar-akar pertentangan antara lain:

- 1) Perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasasaan. Sehingga, hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan.
- 2) Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak

akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaantersebut.

- 3) Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
- 4) Perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Dalam sebuah Konflik pastinya menimbulkan dampak dari proses terjadinya konflik tersebut namun dari setiap konflik yang terjadi tidak selamanya berakhir dengan perselisihan yang berkepanjangan terkadang juga menemukan jalan penyelesaian yang damai. Konflik dapat menimbulkan dampak positif dan negative seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Dampak Positif Konflik

- Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru.

- Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok.
- Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang.
- Konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah.
- Konflik memungkinkan ada penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok.
- Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

2. Dampak Negatif Konflik Sosial

- Konflik sosial dapat menimbulkan perpecahan di suatu kelompok sosial yang tadinya bersatu. Misalnya, konflik agama di Maluku pernah

memicu perpecahan di masyarakat. Untunglah konflik tersebut telah selesai dan rekonsiliasi dapat terjadi.

- Konflik sosial juga dapat berakibat permusuhan dalam masyarakat. Permusuhan yang terjadi seringkali memengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota kelompok.
- Kekerasan juga dapat menjadi akibat dari konflik sosial. Kekerasan terjadi karena ada agresi satu pihak terhadap pihak lain baik secara fisik maupun verbal.
- Dampak lain dari konflik adalah perubahan kepribadian. Hal tersebut dapat terjadi karena individu yang terlibat konflik mengalami tekanan psikologis. Misalnya, seorang anak yang tak mau berkeluarga karena menjadi korban kekerasan orang tuanya.

Jatuhnya korban Korban di sini dapat berupa harta benda, sarana prasarana, korban luka, bahkan korban jiwa. Misalnya, kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di berbagai wilayah di Indonesia menimbulkan banyak tokoh dijarah, banyak perempuan yang diperkosa,

banyak orang yang mengalami luka-luka, juga banyak orang yang kehilangan nyawa.

13.3.4 Cara mengatasi konflik dalam Masyarakat Indonesia

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Terdapat 3 jenis cara dalam penanganan suatu konflik yakni diantaranya:

- 1) Preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah. Hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi, tepo seliro (tenggang rasa), saling bantu dan berbagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. Adapun tujuan dari penyelesaian masalah preventif adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada.

- 2) Represif merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya masalah. Hal yang dilakukan seperti pembubaran paksa dan penangkapan.
- 3) Kuratif merupakan tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Contoh, mentoring korban kerusuhan, perdamaian dengan akta integritas, arbitrase dan lain-lain.

Dalam penanganan suatu konflik juga dapat dilakukan dengan suatu Pendekatan Keadilan Restoratif dalam resolusi konflik pada dasarnya merupakan metode baru khususnya dalam konsep penyelesaian perkara-perkara pidana, akan tetapi menggunakan pola-pola tradisional yang nilai-nilainya telah ada dalam konsep kearifan local masing-masing budaya. Oleh karena itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam resolusi konflik, sesungguhnya adalah penggunaan pola-pola tradisional dengan nilai-nilai resolusi konflik yang ada

dalam kearifan lokal budaya, dengan memfokuskan pada pemenuhan keadilan korban, melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi dan partisipasi. Ada beberapa model yang akan disajikan dalam tulisan ini yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Model penyelesaian berdasarkan sumber konflik.
Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal;
- b. Model Boulding. Model ini menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindari, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat

memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik;

- c. Model pluralisme budaya. Model ini dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama.

d. Model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni coercion, arbitrase, dan mediasi. Coercion adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat

Namun juga tercantum Konsep penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a.
- Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;

- Meredam potensi konflik;
 - Membangun system peringatan dini.
- b. Penghentian konflik, meliputi upaya:
- Penghentian kekerasan fisik;
 - Penetapan status keadaan konflik;
 - Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- c. Pemulihan pascakonflik, meliputi upaya:
- Rekonsiliasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.

Namun Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:

- 1) Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik
- 2) Penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,
- 3) Pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif;

- 4) Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lamadi antara kelompok- kelompok yang bermusuhan,
- 5) Transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif darisumber perbedaan kepada kekuatan positif.

14.1 Kemampuan Akhir Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya integrasi nasional sebagai wujud identitas masyarakat Indonesia, mewujudkan integrasi nasional dalam pengimplementasian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta tantangan dan upaya dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia yang berbasis karakter nilai toleransi, nilai cinta tanah air, dan nilai cinta damai.

14.2 Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

14.2.1 Pentingnya Integrasi nasional sebagai wujud identitas masyarakat Indonesia

14.2.2 Mewujudkan Integrasi nasional dalam pengimplementasian kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

14.2.3 Tantangan dan upaya dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia

14.3 Uraian Materi

14.3.1 Pentingnya Integrasi Nasional sebagai Wujud Identitas Masyarakat Indonesia

Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. “Mengintegrasikan” berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. integrasi bangsa juga dilihat sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. integrasi memiliki arti sebagai penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. (Harimulyono, 2020)

Integrasi nasional memiliki arti penting bagi bangsa ini, yang mana adanya integrasi ini sebagai tolak ukur dalam menyatukan berbagai keberagaman bangsa ini. Masyarakat yang terintegrasi diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik,

maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Dengan adanya integrasi nasional maka menjadi dasar bagi pemikiran seluruh elemen masyarakat dalam menyatukan segala perbedaan demi terciptanya suatu bhinneka tunggal ika.

Dalam segala bentuk kondisi yang telah terjadi, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan untuk selalu tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia. Keberhasilan dalam membangun masyarakat yang berintegrasi berarti juga keberhasilan dalam mewujudkan identitas bangsa. Begitu juga sebaliknya, kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Bhinneka tunggal ika sebagai salah satu identitas bangsa merujuk pada integrasi nasional, yang mana keduanya memiliki prinsip yang sama tentang suatu perbedaan bukanlah penghalang bagi terciptanya kesatuan. Pentingnya integrasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Integrasi nasional mempersatukan perbedaan dari segala bentuk keberagaman. Ketika identitas bangsa berupa bhinneka tunggal ika menegaskan bahwa walaupun berbeda tetapi tetap satu, hal itu dapat diwujudkan dengan integrasi nasional. Ketika integrasi nasional berhasil diwujudkan dalam kehidupan masyarakat maka pedoman bhinneka tunggal ika juga akan tercapai.
2. Meminimalisir konflik. Umumnya konflik terjadi ketika kurangnya toleransi dan juga jiwa persatuan yang rendah. Ketika adanya integrasi maka akan mengubah sudut pandang dari segala aspek masyarakat, perubahan sudut pandang ke arah positif ini akan menghasilkan keselarasan semua elemen masyarakat sehingga konflik yang dikhawatirkan timbul bisa ditangani.

3. Memperkuat ketahanan dari perpecahan konflik luar. Ketika adanya integrasi nasional, maka nilai-nilai budaya bangsa akan dimasukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya penerapan nilai-nilai budaya bangsa, keutuhan dan ketahanan akan semakin mudah terbentuk sehingga ancaman konflik dari luar tidak akan mudah masuk.

14.3.2 Mewujudkan Integrasi Nasional dalam Pengimplementasian Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (plural society) dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat plural di satu sisi adalah rahmat tetapi di sisi lain juga dapat menjadi ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Wujud dari sebuah integrasi yang berhasil ialah dimana perbedaan yang ada tidak menjadi sebuah penghalang untuk bersatu sehingga terbentuklah identitas nasional.

Integrasi nasional adalah konsep penting dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional selain konsep integrasi adalah syarat, dan faktor tercapainya sebuah integrasi.

14.3.2.1 Syarat-syarat dalam Keberhasilan Proses Integrasi Nasional

Dalam integrasi nasional terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan agar proses integrasi nasional dapat berhasil. Tiga syarat berlangsungnya integrasi nasional adalah:

- 1) Anggota masyarakat yang merasa jika mereka mampu dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing.
- 2) Terciptanya sebuah kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan sebuah pedoman.
- 3) Norma dan nilai-nilai sosial tersebut kemudian dijadikan sebuah aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial.

14.3.2.2 Faktor Pendukung Terwujudnya Integrasi Nasional

Bangsa Indonesia tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Maka dari itu untuk mewujudkan integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita memerlukan faktor faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Di Indonesia untuk mewujudkan integrasi nasional dalam berkehidupan Berbangsa dan Bernegara memerlukan :

- 1) Kesadaran perasaan sikap senasib dan seperjuangan.

Hal ini dapat dilihat betapa pengaruhnya kesadaran perasaan senasib dan seperjuangan saat Bangsa Indonesia pada masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Perasaan memiliki nasib yang sama tersebut kemudian menimbulkan inisiatif untuk melakukan perlawanan secara serempak guna mendapatkan kemerdekaan.

2) Rasa cinta Tanah Air

Rasa cinta Tanah Air menjadi faktor penting dalam terwujudnya integrasi nasional. Karena setiap individu yang memiliki kesadaran Rasa cinta Tanah Air maka dalam berkehidupan Berbangsa dan Bernegara terutama dalam bermasyarakat akan mengutamakan kepentingan bersama guna mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dapat kita contohkan saat perjuangan melawan penjajah Indonesia bersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada demi rasa cinta kepada Tanah Air.

3) Adanya keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh

Adanya keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Dapat kita lihat pada sejarah seperti peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dimana warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional.

4) Peran ideologi Pancasila yang sudah di sepakati bersama

Penerapan Pancasila sebagai ideologi yang mempunyai sila-sila dalam Pancasila mempunyai peranan dalam integrasi nasional Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia disebabkan memiliki nilai-nilai sebagai pegangan berbangsa dan bernegara. Pancasila, sebagai ideologi, dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai suatu tujuan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ketetapan bagi warga negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang tersirat dalam sila-sila dan, selanjutnya, gagasan dasar dari sila-sila dalam Pancasila terwujud dan terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pandangan serta pribadi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas, yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam segi kehidupan. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman, bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Hasibuan & Sulistyono, 2018)

- 5) Adanya alat pemersatu seperti Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Lambang Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia raya

Dengan adanya alat pemersatu Bangsa ini Indonesia bisa mewujudkan integrasi nasional dalam berkehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena seperti kita ketahui bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang memiliki keberagaman baik suku, ras, agama, bahasa dan kebudayaan oleh karena itu alat pemersatu Bangsa sangat di perlukan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga intergrasi Bangsa dapat di wujudkan dalam berkehidupan Berbangsa dan Bernegara terutama dalam bermasyarakat.

- 6) Antisipasi dari ancaman asing

Integrasi nasional tidak kalah penting untuk antisipasi adanya ancaman dari asing. Ada berbagai bentuk ancaman dari pihak asing tersebut, seperti upaya pengambilan wilayah atau pulau paling luar

di Indonesia. (Dr. I Putu Ari Astawa, 2017)

14.3.2.3 Penerapan Integrasi Nasional

1) Penerapan Integrasi Nasional di Keluarga

- a. Saling menghormati pendapat antar sesama anggota keluarga.
- b. Mengutamakan kepentingan bersama keluarga jika dibandingkan kepentingan pribadi.
- c. Menghargai perbedaan selera atau kesukaan antar anggota keluarga.
- d. Turut bekerja sama dengan anggota keluarga untuk bergotong royong membersihkan rumah.
- e. Senantiasa patuh dan taat pada kedua orang tua di rumah.
- f. Rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
- g. Memahami karakter anggota keluarga yang lain.
- h. Mendahulukan pemenuhan kewajiban dalam keluarga ketimbang pemenuhan hak.
- i. Rajin belajar di rumah agar menjadi pintar.
- j. Menjalankan tugas dalam keluarga sesuai peran masing-masing.

2) Penerapan Integrasi Nasional di Sekolah

- a. Berbuat baik pada semua teman tanpa terkecuali tanpa membeda-bedakan teman.
- b. Menghargai perbedaan pendapat antar teman di sekolah.
- c. Menghormati guru dan tenaga didik lain di sekolah yang lebih tua.
- d. Mentaati setiap peraturan yang dibuat guru dan kepala sekolah.
- e. Menumbuhkan sikap toleransi pada teman yang berbeda suku atau agama.
- f. Mau mempelajari kebudayaan lain dan menganggapnya sebagai kebudayaan nasional yang harus dilestarikan.
- g. Mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal dan aturannya.
- h. Melaksanakan jadwal piket sesuai dengan waktunya .
- i. Ikut serta dalam upacara bendera setiap hari senin.
- j. Tidak pilih kasih dalam berteman, mau berteman dengan siapa saja tanpamelihat latar belakangnya.

3) Penerapan Integrasi Nasional di Masyarakat

- a. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat.
- b. Menghargai kebudayaan dari suku dan ras lain yang ada dalam lingkungan masyarakat.
- c. Jika ada tetangga yang kesusahan, hendaknya memberikan bantuan.
- d. Ikut serta dalam kerja bakti warga di desa.
- e. Menggunakan metode musyawarah untuk mencapai mufakat jika ada perbedaan pendapat.
- f. Menghormati ibadah umat agama lain dengan tidak mengusiknya.
- g. Menerapkan sikap gotong royong di masyarakat.
- h. Saling tolong menolong dalam lingkungan masyarakat.
- i. Turut berpartisipasi dalam program ronda atau siskamling untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
- j. Membiasakan budaya senyum dan menyapa tetangga saat bertemu.

- 4) Penerapan Integrasi Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- a. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya saat sedang berkendara.
 - b. Menumbuhkan sikap patriotisme dan cinta tanah air.
 - c. Terjadinya proses akulturasi budaya yang jadi hasil pencampuran dua budaya yang berbeda.
 - d. Penyelenggaraan PON atau Pekan Olahraga Nasional untuk mengembangkan bidang olahraga dari tiap daerah.
 - e. Menerapkan toleransi beragama atau toleransi antar suku dalam kehidupan sehari-hari.
 - f. Mentaati aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang.
 - g. Saling menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan politik seperti ikut memilih dalam pemilihan umum (pemilu).
 - i. Terwujudnya asimilasi budaya yang merupakan pembauran dua kebudayaan yang membentuk budaya baru.

- j. Memiliki sikap disiplin dan tidak membuang-buang waktu.

14.3.2.4 Tantangan dan Upaya Dalam Mewujudkan Integrasi Nasional Di Indonesia

14.3.3.1 Tantangan Dalam Mewujudkan Integrasi Nasional Di Indonesia

Suatu Negara membutuhkan persatuan untuk bangsanya agar tidak terpecah belah. Persatuan itu bertujuan agar mampu membangun integrasi nasional dalam rangka memperkokoh nilai toleransi setiap elemen masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkatan, dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dengan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Adanya ragam kemajuan ini pada dasarnya terbagi atas 300 kelompok etnik dan 250 jenis bangsa yang mana pada setiap kelompok etnik itu memiliki identitas kebudayaan sendiri, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakannya.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang “solid” dan integrasi yang mantap serta kokoh

yaitu kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan “SARA” dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaan-perbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa serta kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya dunia memang selalu berubah seiring dengan perubahan masyarakat dunia.

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam perjalanan membangun kehidupan bernegara ini, kita masih sering dihadapkan pada kenyataan adanya konflik antar kelompok dalam masyarakat, baik konflik yang berlatarbelakang kesukuan, konflik antar pemeluk agama, konflik karena kesalahpahaman budaya, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa persoalan integrasi nasional Indonesia sejauh ini masih belum tuntas perlu terus dilakukan pembinaan. Walaupun harus juga disadari bahwa integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan, dan konflik di

antara sesama warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Ini berkaitan dengan kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia dan beberapa faktor yang saling terikat satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial budaya. (Agus, 2016)

Dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tentunya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang dihadapi baik itu datang dari dimensi horizontal maupun vertikal. Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang usianya masih relatif muda. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia masih menghadapi persoalan bagaimana menyatukan penduduk Indonesia yang di dalamnya

terdiri dari berbagai macam suku, memeluk agama yang berbeda-beda, berbahasa dengan bahasa daerah yang beranekaragam, serta memiliki kebudayaan daerah yang berbeda satu sama lain, untuk menjadi satu entitas baru yang dinamakan bangsa Indonesia. Tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras dan geografi. Ini berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat memandang suatu perbedaan yang ada. Pada dasarnya yang menjadi kendala dalam mewujudkan integrasi nasional yaitu rendahnya rasa toleransi dan menghargai segala perbedaan. Pada dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bangsa, daerah, agama dan kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan

ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Konflik horizontal yang sering terjadi adalah konflik yang berlatar belakan keagamaan. Konflik keagamaan sering terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi oleh karena agama merupakan sesuatu hal yang sifatnya sangat sensitif. Ketersinggungan yang bernuansa keagamaan sering memunculkan pertentangan yang meruncing yang disertai dengan tindak kekerasan di antara kelompok penganut suatu agama dan kelompok penganut agama lainnya.

- 2) Dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan

rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa di pinggirkan. (Agus, 2016)

Tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional juga bisa datang dari konflik kedaerahan. Penyebab konflik kedaerahan tersebut adalah:

1. Krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi.
2. Kegagalan lembaga-lembaga Negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga Negara.
3. Pembatasan partisipasi politik warga Negara di daerah-daerah.
4. Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut.
5. Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat. (Harimulyono, 2020)

14.3.3.2 Faktor Penghambat Terwujudnya Integrasi Nasional

Meyujudkan integrasi nasional nyatanya tidak semudah yang dibayangkan, apalagi mengingat maraknya tindakan-tindakan anarkis yang tentunya menyebabkan perpecahan. Bahkan adanya peran pemerintah yang sangat minim juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Adanya kebijakan pemerintah yang kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi nasional.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat terwujudnya integrasi nasional yaitu:

- a) Semakin menonjolnya sikap individualis yang bertentangan dengan asasgotong royong.
- b) Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari kekayaan. Hal ini bisa berakibat pada dikesampingkannya etika dan kendurnya moralitas.

- c) Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. (Suri & Sianturi,2021)
- d) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Dalam mewujudkan integrasi nasional seringkali adanya berbagai penolakan terhadap unsure kebudayaan yang berbeda. Pola pikir yang seperti inilah menjadi kendala sehingga integrasi nasional sulit diwujudkan.
- e) Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Berbagai keragaman masyarakat membentuk pola pemilahan sosial yang akan ikut berpengaruh pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pola pemilahan sosial bercorak consolidated yang sedikit bertentangan dengan prinsip integrasi.
- f) Kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Integrasi nasional sulit diwujudkan karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait pentingnya nilai toleransi dalam menciptakan persatuan bangsa.

- g) Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Adanya ketimpangan yang seperti inilah yang menyebabkan munculnya konflik. Terjadi kesenjangan yang tajam antar daerah di mana daerah yang kondisinya “terbelakang” merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, adanya daerah- daerah yang merasa terpencil dan terisolasi dari daerah lainnya, dan minimnya sarana transportasi dan sarana komunikasi sehingga memunculkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah lainnya.
- h) Tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik. Integrasi tidak dapat diwujudkan ketika rakyat tidak menyadari tugasnya, ketidaksadaran itulah yang menyebabkan rendahnya nilai-nilai persatuan dalam mewujudkan Negara yang berintegrasi.

14.3.3.3 Upaya Integrasi Nasional yang dilakukan NKRI dalam Mewujudkan Integrasi Nasional

1) Penggunaan Bahasa Indonesia

Kita tentu sudah sangat tahu bahwasanya Indonesia terdiri dari kultur atau budaya yang majemuk. Pasalnya kita memiliki banyak sekali suku, ras termasuk bahasa daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk menjalankan integrasi nasional, pemerintah pun menerapkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Agar tidak terjadi miskomunikasi antar masyarakat yang berbeda bahasa. Penerapan penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat kita jumpai di lembaga pendidikan seperti sekolah dan acara-acara resmi lainnya.

2) Toleransi dan Solidaritas Antar Golongan

Untuk bisa bersatu padu membentuk negara yang tentram dan rukun, warna negara Indonesia tentu diwajibkan untuk terus menjaga toleransi di tengah budaya multikultural ini. Sebagai sesama rakyat Indonesia, sudah sepatutnya kita bersikap saling menghargai antar golongan yang satu dengan golongan lainnya. Sikap Toleran yang tinggi serta

didukung dengan solidaritas pada masyarakat tentunya akan mewujudkan integrasi nasional.

3) Menanamkan Sikap Tenggang Rasa

Sikap tenggang rasa atau saling membantu satu sama lain merupakan hal yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita bisa hidup dengan rukun dan bersatu padu demi keutuhan Negara, serta menghindari intrik antar sesama rakyat Indonesia. Jika suatu Negara mampu menjalankan integrasi nasional dengan baik, maka Negara tersebut bisa menjadi negara yang semakin maju dengan masyarakat yang rukun dan sejahtera. Karena jika setiap golongan ingin sama-sama bersatu dan berintegrasi tentu cita-cita luhur bangsa bisa tercapai. Oleh sebab itu, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, kita perlu untuk menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap sesama rakyat sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Kusumawardani & Faturochman. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi, Tahun XII*, No. 2.
- Antara News. (2006, Agustus 13). *Daniel Dhakidae : Indonesia Dalam Ancaman Etnonasionalisme*. Diambil kembali dari ANTARANEWS.com: <https://www.antaraneWS.com/berita/40061/daniel-dhakidae-indonesia-dalam-ancaman-etnonasionalisme>
- Donny .H. (2008). Kebijakan Validimir Putin Terhadap Gerakan etnonasionalisme Chechnya di Rusia (2000-2005). *Skripsi*. FIB UI.
- Dr. Aman, M.Pd. (2011). Model Model evaluasi pembelajaran sejarah, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Dr. Drs. Harun Umar., M. (2020). *Isu-Isu Dalam Perspektif Analisis Politik Hubungan Internasional* . Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional Jakarta (LPU-UNAS).
- Handoko, S. T. (2019). Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara dan Nasionalisme Kewarganegaraan di Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 4(2)*, 100- 110.

- Kharinda .R. , Radhi .D. (2018). Etnonasionalisme Mantan Anggota Gam Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009-2014 Dalam Perumusan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 3, Nomor 2: 320-347.
- Kusumawardani, A., & Faturochman, M. A. (2004). Nasionalisme. *Buletin Psikologi*, 12(2).
- Leerssen, J. (2013). Notes toward a Definition of Romantic Nationalism. *Romantik: Journal for the study of Romanticisms*, 2(1), 9-35.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19-30.
- Mardiansyah, Arrochman. (2001). Negara Bangsa dan Konflik Etnis: Nasionalisme vs Etno-Nasionalisme. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4, Nomor 3, Maret 2001 (289-316).
- Sari, Cuta Maya Aprita. 2018. The Imagined Community Of Indonesia: Pertentangan Nasionalisme Indonesia vs Etnonasionalisme Bangsa Aceh dalam Gerakan Aceh Merdeka(GAM). *AL-IJTIMA`I- International Journal of Government and Social Science*, Vol. 3, No. 2, April

2018.

- Simonsen, K. B., & Bonikowski, B. (2020). Is civic nationalism necessarily inclusive? Conceptions of nationhood and anti-Muslim attitudes in Europe. *European Journal of Political Research*, 59(1), 114-136.
- Zulham. (2016). Reintegrasi Etno-Nasionalisme Separatis Pada Nasionalisme Indonesia Raya: Studi Etno-Nasionalisme Aceh Pasca Damai. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2016.
- Agus, A. A. (2016). Integrasi Nasional Sebagai Salah Satu Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 19-26.
- Dr. I Putu Ari Astawa, S. M. (2017). Integrasi Nasional. Universitas Udayana. Fatimah, N. A., & Fatinova, D. (2020, November). INTERFERENSI DAN INTEGRASI DALAM NOVEL GENDUK KARYA SUNDARI MARDJUKI (KAJIAN SOSIOLINGUISTIK). *Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia Unpam*.

- Harimulyono, N. (2020, 10 16). *Pendidikan Kewarganegaraan Bab IX Integrasi Nasional*.
- Hasibuan, A. S., & Sulistyono, D. (2018). PERANAN IDEOLOGI DALAM INTEGRASI NASIONAL. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 1(1)*, 1- 10.
- Suri, F., & Sianturi, F. V. (2021). SIKAP IMPLEMENTASI INTEGRASI NASIONAL DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA PADA SISWA/SISWI KELAS X SMA NEGERI 4 KISARAN KABUPATEN ASAHAN. MUDABBIR. *JOURNAL RESEARCH AND EDUCATION STUDIES, 1(1)*, 92-98.
- Utoyo Marsudi. 2015. *Perspektif Agama-Agama di Indonesia Terhadap Pluralisme Agama*. *Journal Of MMH, 44(4)*: 454-460.
- Ida Bagus P.M. (2016) . *Hindu, Pliralitas dan Ketlrukunan Beragama*. *JournalOf Al-AdYan, 11(1)*: 1-18
- Sumarah Ignatia. (2012).*Pluralisme Agama Dalam Perpektif Kesatuan*. Universitas Santa Dharma: Yogyakarta.
- Intan Ahmad. (2016). *Pendidikan Agama Khonghucu*. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Jakarta

- Watra, I Wayan. (2020). *Agama-Agama dalam Pancasila di Indonesia (Prespektif Filsafat)*. Bali: UNHI Press
- Rambitan, Stanley. R. (2017). *Pluralitas Agama dalam Pandangan Kristen dan Implikasinya bagi Pengajaran PAK*. Shanana Jurnal Pendidikan Agama Kristen, 1(1), 93
- Aditya Perdana Putra. (2019). Sejarah Mempertahankan Integrasi Bangsa. Diambil kembali dari Pahamify: <https://pahamify.com/artikel/mempertahankan-integrasi-bangsa/amp/>
- Agustina Magdalena .D .S. (2002, Februari 9). INTEGRASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA SEBUAH PROSES YANG BELUM SELESAI. Universitas Diponegoro Semarang.
- G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 25. Makfi, Samsudar. (2019). Awal Pergerakan Nasional. Maraga Borneo Tarigas.
- Sartono Kartodirjo, dkk., Sejarah Nasional Indonesia V, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 1977), hlm. 181.
- Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908- 1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 7.

Suroyo, Agustina. (2002). Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia : Sebuah Proses Yang Belum Selesai.

Serafica Gischa. (2020, Januari 30). Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo. Diambil kembali dari Kompas.com:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/30/060000269/pergerakan-nasional-di-indonesia-diawali-organisasi-budi-utomo>